

**MEDIASI STRUKTUR POLITIK OLEH SURATKABAR**  
(Studi *Content Analysis* Terhadap Surat kabar Ibukota)

***POLITICAL STRUCTURE MEDIATION BY NEWSPAPERS***  
(*Content Analysis Study On Newspaper In Capital City*)

**Hasyim Ali Imran**

Peneliti pada BPPKI Jakarta Badan Litbang SDM Kementerian Kominfo RI,  
Jln. Pegangsaan Timur No. 19 B Jakarta Pusat  
(Naskah diterima Maret 2014, diperiksa mitra bestari Mei 2014, direvisi Mei 2014,  
disetujui terbit Juni 2014)

**ABSTRACT**

*Background of this research is the phenomenon of political structure components in political system through agenda setting in newspaper's headline. By using content analysis on the basis of agenda setting model, this research focuses on five main problems which are substantively related to political structure component phenomenon and selection component one in the proses of agenda setting. Recording units of this study are headline news of Kompas, Republika, Media Indonesia and Rakyat Merdeka on edition of January 2014. This study conclude that 1) newspapers -in the position as components of political infrastructure- empirically shows an evidence that they takes role for "their existence", survival of political communication process in Indonesian political system; 2) media prefer to put priority on top down political communication stream rather than bottom up one; 3). "Interest" of media regarding political process between components in political suprastructure, have a relationship with problem of priority scaling of issues in the process of agenda setting. Regarding of media "Interest", this become important input for political actors in the relation of issue expression which draws a media sailence in order that information not to create ambiguity, negative image, misunderstanding or incredibility among newspaper's audience.*

**Key words : Mediating; Political Structure ; Newspaper.**

**ABSTRAK**

Berlatarbelakangkan mempelajari fenomena pemediasian komponen-komponen struktur politik dalam sistem politik melalui pengagendaaan media dalam *headline* surat kabar, maka dengan menggunakan studi *content analysis* berbasiskan model studi *agenda setting*, penelitian fokus menjawab lima permasalahan pokok yang secara substantif diantaranya menyangkut fenomena pemediaan komponen struktur politik dan fenomena seleksi komponen dalam proses *agenda setting*. Dengan menjadikan pemberitaan *headline* Kompas, Republika, Media Indonesia dan Rakyat Merdeka edisi Januari 2014 sebagai *recording unit*, penelitian diantaranya menyimpulkan, 1) pihak surat kabar dalam posisinya yang juga sebagai bagian dari pihak dalam komponen infrastruktur politik, secara empirik telah membuktikan dirinya sebagai pihak yang berperan besar bagi "hidup"-nya keberlangsungan proses komunikasi politik dalam sistem politik Indonesia saat ini; 2) Pihak media itu tampak cenderung lebih mengutamakan arus komunikasi politik yang sifatnya *top down* dari pada yang bersifat *bottom up*.; 3); "Interest" media terkait penciptaan proses komunikasi politik di antara sesama unsur dalam komponen suprastruktur politik, kemunculan fenomenanya berindikasi saling berkaitan dengan persoalan penentuan urutan tingkat kepentingan isu dalam proses pengagendaaan media. Berkaitan dengan "Interest" media, ini menjadi *in put* penting bagi para aktor politik dalam kaitan berekspresi menyangkut isu yang menjadi perhatian media agar informasi yang beredar itu tidak menciptakan ambiguitas, citra negatif, *misunderstanding* atau *incredibility* di kalangan khalayak media surat kabar.

**Kata-kata kunci : Mediasi; Struktur Politik; Surat kabar.**

## PENDAHULUAN

Membicarakan media dengan stuktur politik, secara terminologis itu berarti terkait dengan pembicaraan mengenai sistem politik. Sistem politik sendiri pada hakikatnya mengandung makna suatu totalitas unsur yang saling berketergantungan dalam suatu himpunan yang secara ideal berorientasi pada suatu *goal* (tujuan) (Bandingkan, Kantaprawira, 1988; 3 dan 8).

Sebagai suatu sistem, secara teoritis sistem politik sendiri diketahui merupakan sebagai salah satu sub sistem dari sistem yang lebih besar, yaitu sistem sosial. Dengan begitu, berarti dalam bekerjanya, suatu sistem politik itu tidak bekerja dalam situasi yang vakum melainkan dalam situasi yang dinamis dan ber-*interplay* dengan sub sistem-sub sistem lainnya seperti sub sistem budaya; sub sistem ekonomi; sub sistem komunikasi; sub sistem bahasa dan sub sistem lainnya.

Sehubungan sub sistem politik itu bekerja dalam situasi yang begitu ‘terbuka’<sup>1</sup>, makanya sistem politik seperti sistem politik Indonesia saat ini, relatif menjadi sulit dalam mencapai *goal*-nya. Ini karena begitu banyaknya virus-virus yang mengganggu bekerjanya sistem politik itu.<sup>2</sup>

Dalam kaitan media sebagai bagian dari suatu sistem politik, ini diantaranya bisa ditelusuri dari eksistensi sistem politik itu sendiri. Secara terminologis, sistem politik sendiri pada hakikatnya terdiri dari unsur-unsur yang terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu bagian yang disebut supra struktur dan bagian yang disebut infra struktur (Lihat, Kantaprawira, 1988 : 54).

Supra *Struktur Politik* yaitu pihak-pihak yang langsung terlibat dalam penyelenggaraan kehidupan negara. Pihak yang demikian, sejauh dapat dicatat terdiri dari : 1). Lembaga Tinggi Negara : Presiden; DPR, MPR, MK. MA, KY; 2) Lembaga Independen Negara : KPU, KPI, Komisi Perempuan, dll komisi.; 3) Lembaga Legislatif : DPRD I , DPRD II; 4) Lembaga-lembaga Pemerintah setingkat kementerian ke bawah : Kementerian’ dirjen; badan, lembaga, direktorat; dinas, kecamatan, kelurahan; 5) UPT-UPT : Misal : Bendungan/pintu air Katulampa; dan 8) Lembaga-lembaga Parpol : Parpol yang sudah jadi anggota legislatif. Sementara *Infrastruktur Politik* berarti pihak-pihak yang tidak atau tidak langsung terlibat dalam penyelenggaraan kehidupan negara. Lembaga-lembaga seperti ini diantaranya adalah -Lembaga NGO : LSM-LSM; -Lembaga Asosiasi/Serikat-serikat : SBI, FBR dll; -Parpol yang belum jadi anggota legislatif seperti kontestan pertama dalam pemilu legislatif; -Media Massa (by internet seperti detik com oke zone, dill; surat kabar; majalah; televisi; radio siaran; dan anggota/tokoh masyarakat, individual atau mewakili kelompok.

Melihat pembagian struktur politik di atas, diketahui bahwa media massa termasuk menjadi bagian dari *Infrastruktur Politik* dalam struktur politik dari suatu sistem politik. Sebagai bagian dari sub sistem politik pada level infrastuktur politik, secara teoritis di satu sisi media massa seperti surat kabar, memainkan peran fungsi pemediaan pesan bagi semua pihak dalam bentuk apapun termasuk seperti bentuk aspirasi kepada khalayak luas. Di sisi lain, dalam pemeranan fungsinya itu, media juga menjadi relatif sulit untuk bisa bebas dari nilai dan karenanya media jadi cenderung dapat memainkan perannya tadi dengan cara ‘memboncengkan’ *interest-interest* mereka dalam pemediaan pesan surat kabar. *Interest-interest* dimaksud, dalam perspektif kritikal diantaranya yaitu berupa ideologi-ideologi tertentu (Altschull, dalam Severin dan Tankard, 1997 :345). Sementara dalam perspektif positivistik, meskipun awak media secara teoritis disebutkan mereka melakukan operasionalisasi media mereka itu dengan bebas nilai (*free value*) (lihat, Rusadi, 1998, 8), namun dalam realita tampaknya merekapun kesulitan juga untuk bersikap obyektif yang benar-benar bebas nilai dalam pemediaan pesan. Fenomena kesulitan dimaksud setidaknya dapat dilihat dari pemediaan menyangkut pemberitaan yang sifatnya *headline* surat kabar.

---

<sup>1</sup> Sistem politik yang demikian, secara terminologis dikenal dengan sistem politik yang bekerja dalam sistem politik terbuka. Sistem ini diadopsi oleh Pemerintah Indonesia sejak era reformasi. Era sebelumnya menganut sistem politik tertutup.

<sup>2</sup> Bandingkan, H.M., Jogiyanto, “ANALISIS & DISAIN SISTEM INFORMASI: Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis”, disisi Kedua, Cetakan Pertama, Penerbit ANDI Yogyakarta, 1999.

*Head line* (HL) surat kabar yaitu berita utama yang terpilih dari sejumlah berita yang hendak dimuat surat kabar pada setiap edisi terbitnya, yang pemuatannya disajikan pada halaman pertama bagian atas surat kabar dengan tipe huruf yang jauh berbeda dengan pemberitaan lainnya (Bandingkan : Assegaff , 1983: 119; Koeswinarno dan Budiyo, 1991: 21; Effendy , 1989: 160). Sebagai berita yang khas menjadi pilihan kebijakan redaksi, HL suatu surat kabar karenanya cenderung menjadi berbeda pemunculannya antara surat kabar satu dengan yang lainnya. Keperbedaan itu tentunya menjadi indikator bahwa dalam proses pemediaan isi media prinsip *free value* itu memang relatif sulit untuk dilaksanakan secara murni.

HL surat kabar yang dalam realita cenderung beragam itu, dari segi sub sistem politik dalam tataran komponen infrastruktur politik, pada gilirannya dengan sendirinya itu menyebabkan komponen-komponen dalam infrastruktur politik itu menjadi lebih besar peluangnya untuk dimediasi oleh pihak media dalam proses pengagendaan media (*agenda setting*). Tambahan lagi, pers Indonesia yang beroperasinya itu memang ditunjang pula oleh iklim pers yang bebas sejak Indonesia memasuki era pemerintahan reformasi. Berdasarkan asumsi-asumsi dimaksud, penelitian ini akan mencoba fokus pada fenomena pemediaan (*encoding*) tersebut dalam kaitannya dengan komponen struktur politik.

Bertolak dari latar belakang dan pemfokusan masalah sebelumnya, permasalahan dalam penelitian ini karenanya dirumuskan mejadi dua bagian. Pertama terkait dengan soal struktur politik dan kedua terkait dengan soal isue *agenda setting* : Bagian pertama : 1) Terkait dengan struktur politik, komponen apa sajakah yang dimediasi oleh organisasi media surat kabar itu ? 2) Komponen-komponen apakah dalam struktur politik yang paling banyak lolos dalam seleksi proses *agenda setting* itu ? 3) Komponen apakah dalam struktur politik yang menjadi sasaran komunikasi dalam HL yang lolos dalam seleksi proses *agenda setting* itu ? Bagian kedua : 4) Terkait pemediaan struktur politik, pada Isue dalam bidang apa sajakah yang paling banyak lolos dalam proses *agenda setting* itu ? 5) Dalam Isue pada topik apa sajakah komponen-komponen struktur politik itu dimediasi oleh pihak organisasi media surat kabar ?

#### **Maksud dan tujuan**

Secara umum penelitian ini bertujuan mempelajari fenomena bekerjanya sistem politik melalui proses pemediannya dalam surat kabar. Secara khusus, ingin mengetahui bagaimana surat kabar sebagai bagian dalam komponen infrastruktur politik memainkan perannya dalam sistem politik melalui proses *agenda setting*.

#### **Konsep-Konsep Teoritik Struktur Politik**

Membahas tentang konsep struktur politik sebenarnya masuk ke dalam ranah ilmu politik. Dalam terminologi ilmu politik sendiri, struktur politik sendiri berarti suatu pelemagaan hubungan organisasi antara komponen-komponen yang membentuk bangunan itu (Kantaprawira, 1988 ; 40). Struktur, bangunan atau kerangka politik itu sendiri, ia diketahui merupakan suatu komponen dalam sistem politik.

Sistem politik sendiri mendapatkan banyak rumusan dari berbagai pakar. Dengan mengacu pada pengertian sistem<sup>3</sup>, maka dalam kaitannya dengan konsep politik Kantaprawira mendefinisikan sistem politik menjadi suatu mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungannya satu sama lain yang menunjukkan suatu proses yang langgeng. (Kantaprawira, 1988 ; 8). Robert A. Dahl (1977) mendefinisikannya : “... *as any persistent pattern of human relationships that involves, to a significant extent, control , influence, power, or authority* . Atau suatu pola yang tetap dari hubungan–hubungan antara manusia yang melibatkan sampai dengan tingkat tertentu, kontrol, pengaruh, kekuasaan, ataupun wewenang.

Definisi lain tentang sistem politik, yakni berasal dari Gabriel A. Almond; A. Hooderwerf; David Easton. Menurut Gabriel A. Almond, sistem politik merupakan organisasi melalui mana masyarakat merumuskan dan berusaha mencapai tujuan-tujuan bersama mereka.

<sup>3</sup> Menurut Kantaprawira (1988), sistem berarti suatu kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur (elemen). Unsur, komponen, atau bagian yang banyak ini satu sama lain berada dalam keterikatan yang kait mengait dan fungsional. Masing-masing kohesif satu sama lain , sehingga ketotalitasan unit terjaga utuh eksistensinya.

A. Hooderwerf mengartikannya bahwa sistem politik adalah seluruh pendirian, kelakuan dan kedudukan, sepanjang bertujuan untuk mempengaruhi isi, terjadinya dan dampak kebijaksanaan pemerintah. Sementara David Easton mengartikannya sebagai suatu keseluruhan interaksi yang mengakibatkan terjadinya pembagian yang diharuskan dari nilai-nilai bagi suatu masyarakat.

Berdasarkan sejumlah pengertian sistem politik sebelumnya diketahui bahwa baik secara tersurat maupun tidak tersurat, inti utama dari makna pengertian sistem itu sebenarnya berkaitan dengan soal nilai. Nilai-nilai dimaksud berkaitan dengan soal pendistribusiannya dalam masyarakat. Dengan demikian makna dari konsep sistem politik sebenarnya dapat disimplikasi menjadi suatu abstraksi menyangkut soal pendistribusian nilai di tengah masyarakat.

Berkaitan dengan soal pendistribusian dimaksud, makanya disebutkan bahwa suatu sistem politik itu pasti mempunyai fungsi bagi sistem politik itu sendiri dan fungsi ini dijalankan oleh struktur politik itu tadi. Fungsi dimaksud sebagaimana dikatakan para ahli yaitu menyangkut dua fungsi yaitu fungsi *in put* dan fungsi *out put*. Fungsi input itu dapat terlaksana dalam sistem politik yaitu melalui aplikasi sejumlah fungsi dalam sistem. Fungsi-fungsi yang ada dalam sistem politik sendiri cakupannya ada tujuh, yaitu : 1) *Sosialisasi dan rekrutmen politik*. ; 2) *Artikulasi kepentingan*; 3) *Agregasi (pengelompokan) kepentingan*; 4) *Komunikasi politik*; 5) *Pembuatan peraturan*; 6) *Penerapan peraturan*; dan 7) *Pengawasan peraturan*.

Dari ketujuh fungsi sistem politik sebelumnya, maka diantaranya ada yang memerankan fungsi *in put* dan ada yang memerankan fungsi *out put*. Yang termasuk diperankan **fungsi in put** adalah fungsi-fungsi sbb. : 1) *Sosialisasi dan rekrutmen politik*. ; 2) *Artikulasi kepentingan*. 3) *Agregasi (pengelompokan) kepentingan*; 4) *Komunikasi politik*. Sementara **fungsi out put** diperankan oleh fungsi sistem politik dalam tataran fungsi 5) *Pembuatan peraturan*; 6) *Penerapan peraturan* dan 7) *Pengawasan peraturan*.

Pemeranan fungsi sistem politik tadi, baik pada fungsi *in put* maupun fungsi *out put*, secara fisik itu dilakukan oleh struktur politik<sup>4</sup> yang terdapat dalam suatu sistem politik. Struktur politik tersebut, dalam sistem politik menurut Almond dan Coleman (dalam Kantaprawira 1988 : 54) dibedakan menjadi dua yaitu infrastruktur politik dan suprastruktur politik<sup>5</sup>. Infrastruktur politik berarti struktur politik masyarakat/rakyat, suasana kehidupan politik masyarakat/rakyat (*political infrastructures subsets, socio-political sphere*), dan supra struktur politik, yaitu struktur politik pemerintahan sektor pemerintahan, suasana pemerintahan, sektor politik pemerintahan (*political suprastructures, surface structures, govermental sphere, formal political machines*), maka pemenuhan tugas dan tujuan masing-masing berbeda pula.

#### **Organisasi media (suratkabar) dan Pemediaan Pesan**

Hakikat pemediaan pesan oleh organisasi media secara terminologis merefleksikan sifat dikotomistis. Sifat mana secara relatif merefleksikan pemikiran dari dua kutub aliran pemikiran tentang media massa, yakni Liberal – Pluralis (Chicago School) dan Marxis – Kritis (Frankfurt School). Aliran pemikiran Liberal – Pluralis muncul dari kalangan intelektual Chicago School – Amerika Serikat seperti Lasswell, Berelson, Lerner, Schramm dan Berlo. Perspektif mereka dibangun atas dasar paham individualisme. Dalam kaitan media massa yang inheren dengan soal perubahan sosial, karenanya kubu *Chicago School* memandang atau memahaminya dari sisi individu<sup>6</sup>. Berbeda dengan aliran pemikiran Liberal – Pluralis, maka aliran Marxis – Kritis yang muncul dari kalangan intelektual yang tergabung dalam Frankfurt School Jerman, seperti Theodor W. Adorno, Horkheimer dan W. Benjamin itu<sup>7</sup>, membangun perspektif perubahan sosial tadi diilhami oleh kritik idealisme Karl Marx, bahwa manusia sebagai pencipta cara hidupnya sendiri secara keseluruhan (kolektif – totaliterian)<sup>8</sup>.

---

<sup>4</sup> Menurut Almond (dalam, Kantaprawira, 1988 : 42), struktur politik selalu dilengkapi dengan sejumlah fungsi. ....

<sup>5</sup> Menurut Almond, suprastruktur politik tersebut mempunyai fungsi : 1) *rule making* 2) *rule application* 3) *rule adjudication*. (dalam Kantaprawira, 1988 : 52)

<sup>6</sup> Laeyendecker, L. 1983, *Tata, Perubahan, Ketimpangan : Suatu Pengantar Sejarah Sosiologi*, Jakarta, Gramedia, hlm.361.

<sup>7</sup> Effendi, Onong Uchyana, 1993, *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, PT.hlm.405.

<sup>8</sup> Rusadi, Udi, 1998, "Perspektif Studi Media Massa", *Jurnal Kampus Tercinta Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Jakarta, Yayasan Kampus Tercinta, hal. 5.

Perbedaan ideologi yang mendasari kedua kubu itu, pada gilirannya membedakan kedua kubu secara dikotomistis dalam memandang eksistensi media massa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Menurut Liberal – Pluralis, media itu merupakan instrument *an sich* untuk penyampaian pesan (*content*). Sedang Marxis – Kritisal, media merupakan industri budaya. Seiring perbedaan tersebut, konsep massa dari media massa pun mengalami pengertian berbeda di antara keduanya. Aliran Liberal – Pluralis, massa yaitu individu-individu yang menerima pesan dalam waktu yang sama. Sedangkan aliran Marxis – Kritisal, massa yaitu homogenisasi sosial, kelompok masyarakat dalam kaitan kekuasaan elit tertentu, massa dalam kaitan totalitarianisme. Dengan begitu, kekuatan media pun menjadi berbeda menurut kedua kubu. Liberal – Pluralis berpendapat, konsep kekuatan disamakan dengan konsep pengaruh (efek), sementara Marxis – Kritisal berpendapat bahwa kekuatan media itu adalah kekuatan *ideologis*. Karenanya bagi Liberal – Pluralis, kekuatan media dalam mempengaruhi khalayak, terletak pada pesan dalam hubungannya dengan khalayak dengan model satu dimensi. Sedang Marxis – Kritisal, proses munculnya kekuatan media itu melalui proses dalam model dua atau tiga dimensi. Karenanya, kekuatan media terletak pada pemilikan dan pengendalian organisasi media.

Dengan kekuatan media itu, maka efek media pun diartikan Liberal – Pluralis sebagai perubahan yang terjadi pada individu. Sementara Marxis – Kritisal, efek yaitu kemampuan media untuk memperkuat kelas dominan, mengabsahkan sistem yang ada. Untuk dapat mencapai kekuatan media yang diharapkan tadi, makanya menurut pandangan Liberal – Pluralis, isi pesan yang disajikan media itu harus bersifat spesifik, materi apa adanya (*raw*). Sifat pesan yang demikian sendiri, bisa dilakukan kalau media itu fungsinya diartikan sebagai transmitter pasif, di mana media hanya mereproduksi dan menyampaikan realitas<sup>9</sup>. Posisi demikian, dengan sendirinya menjadikan organisasi media dalam proses *encoding*, senantiasa harus objektif, berusaha menjadi mediator yang bebas nilai (*free value*). Sebagai lawan dari perspektif Liberal – Pluralis, maka menurut Marxis – Kritisal, kekuatan media itu bisa dicapai kalau isi pesan yang disajikan media itu disusun dan diinterpretasi dalam kaitan aturan atau kode tertentu. Untuk itu, karenanya fungsi media tidak dinilai sebagai transmitter pasif, melainkan berfungsi sebagai transmitter aktif.

Sebagai transmitter aktif, dalam proses *encoding* organisasi media dengan sendirinya melakukan proses pengarahan atau penekanan tertentu (*shaping*) pada realitas<sup>10</sup>. Dengan demikian, berarti organisasi media dalam proses *encoding* atau pemediasian pesan atas suatu realitasnya itu cenderung subjektif, mereka tidak bebas nilai atau terikat dengan nilai-nilai tertentu ketika mereka melakukan proses pengarahan atau penekanan tertentu (*shaping*) pada realitas. Nilai-nilai itu bisa berupa representasi nilai yang dijunjung tinggi oleh media dan bisa pula berupa nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh awak media di dalamnya, misalnya redaktur tertentu, atau sejenisnya. Bentuknya beragam, bisa merepresentasikan ideologi politik, agama, atau ekonomi. Jadi, jika perspektif kritisal ini dijadikan acuan untuk memahami media, tampaknya pihak-pihak yang berada di luar media, seperti pembaca, akademisi, atau pengamat, senantiasa harus mencurigai apa-apa yang disajikan media itu. Hal ini sangat wajar mengingat apa saja yang disajikan media tadi secara teoritis memang tidak pernah terlepas dari nilai-nilai ideologi.

Media mempunyai kepentingan dengan apa-apa yang mereka sampaikan mengenai realitas, yakni menghegemoni<sup>11</sup> pikiran pihak-pihak di luar media agar sependangan dan

<sup>9</sup> Rusadi, Udi, 1998, "Perspektif Studi Media Massa", *Jurnal Kampus Tercinta Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Jakarta, Yayasan Kampus Tercinta, hal. 8.

<sup>10</sup> Rusadi, Udi, 1998, "Perspektif Studi Media Massa", *Jurnal Kampus Tercinta Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Jakarta, Yayasan Kampus Tercinta, hal. 12

<sup>11</sup> Hegemoni merupakan sebuah konsep yang ditemukan oleh Antonio Gramsci. *By hegemony, Gramsci meant the permeation throughout society of an entire system of values, attitudes, beliefs and morality that has the effect of supporting the status quo in power relations. Hegemony in this sense might be defined as an 'organising principle' that is diffused by the process of socialisation into every area of daily life. To the extent that this prevailing consciousness is internalised by the population it becomes part of what is generally called 'common sense' so that the philosophy, culture and morality of the ruling elite comes to appear as the natural order of things. [Boggs 1976 p39]* (Burke, B. (1999, 2005) 'Antonio Gramsci, schooling and education', *the encyclopedia of informal education*, <http://www.infed.org/thinkers/et-gram.htm>.)

akhirnya memang bersatu sikap dengan mereka mengenai suatu realitas. Perwujudan penghegemonian itu sendiri, maka di situ media melalui pewacanaan dengan sendirinya telah berhasil melakukan upaya-upaya penindasan, marginalisasi terhadap pihak-pihak tertentu yang diinginkan pihak media.

Penindasan dan pe-marginalisasi-an bukanlah menjadi sesuatu yang ideal di tengah-tengah kehidupan yang demokratis. Dalam kehidupan yang demikian, semua anggota masyarakat memiliki kesetaraan, sehingga bentuk-bentuk penindasan dan marginalisasi, termasuk melalui wacana media tentunya, jadi patut disingkirkan karena sifatnya bisa memperdaya masyarakat pembaca. Karena itu, menurut Luke (1997) maka upaya-upaya penindasan, marjinalisasi pihak tertentu yang dilakukan media melalui wacana akan terus berlanjut tanpa tantangan jika teks yang mereka sajikan itu memang sudah tidak secara kritis lagi dianalisis guna mengungkapkan dominasi dan hubungan-hubungan kekuasaan yang ada di balik teksasinya. Jadi, mengacu pandangan Luke ini maka mau tidak mau, kalau ingin menemukan apa yang sebenarnya terjadi di balik sebuah pewacanaan, maka tidak bisa hanya dengan melihat dan mendengar dari apa yang tampak di luar saja, melainkan harus dibuka kedok yang menutupi media pembuat wacana itu.

#### **Agenda Setting**

Salah satu teori yang secara ilmiah memfasilitasi bagaimana melakukan studi fenomena isi media melalui teknik pengumpulan data *content* analisis adalah teori Agenda Setting dari Mc Comb dan Donald Shaw (McCombs, M.E., & Shaw, D.L. (1972). *Agenda setting describes a very powerful influence of the media – the ability to tell us what issues are important.*

*As far back as 1922, the newspaper columnist Walter Lippman was concerned that the media had the power to present images to the public, mengatakan bahwa secara spesifik agenda setting is a theory about the transfer of salience of the elements in the mass media's pictures of the world to the elements in the pictures in our heads. The core theoretical idea is that elements prominent in the media picture become prominent in the audience's picture. In the words of the agenda setting metaphor, this is a causal assertion that the priorities of the media agenda influence the priorities of the public agenda.*([http://www.unc.edu/courses/2000fall/jo mc.245-001/agenda\\_setting.html](http://www.unc.edu/courses/2000fall/jo mc.245-001/agenda_setting.html)).

Apa yang dikatakan Lipman sebelumnya tentang “**the transfer of salience of**“, dalam kenyataan riset agenda setting, adakalanya tidak selalu harus dilakukan hingga ke tingkat pengukuran kesesuaian antara “**the mass media's pictures of the world**” dengan “**the pictures in our heads**”. Asumsi ini paling tidak dikuatkan oleh asumsi yang terdapat dalam teori agenda setting, di mana disebutkan “Agenda-setting is the creation of public awareness and **concern of salient issues by the news media**. Two basis assumptions underlie most research on agenda-setting: (1) the press and the media do not reflect reality; **they filter and shape it**; (2) media **concentration on a few issues and subjects** leads the public to perceive those issues as more important than other issues. ....In addition, different media have different agenda-setting potential”. Argumentasi penguat lainnya yaitu *Agenda-setting as a concept is not limited to the correspondence between salience of topics for the media and the audience*”. ([http://www.unc.edu/courses/2000fall/jo mc.245-001/agenda\\_setting.html](http://www.unc.edu/courses/2000fall/jo mc.245-001/agenda_setting.html)).

Dalam hubungan encoding media terkait dengan teori agenda setting tadi, maka sebagaimana dikatakan Mc Comb dan Donald Shaw (dalam Rusadi, 1996 : 49), pada tahap pertama para pelaksana media itu melakukan proses seleksi terhadap isu-isu yang ada di lingkungannya, kemudian menyajikan isu tersebut dengan melakukan penajaman atau penonjolan pada hal-hal tertentu, dan selanjutnya khalayak menangkap isu-isu tersebut melalui proses kognitif mereka.

Mempelajari dalam tataran deskriptif tentang praktisi media melalui perilaku tertentu dalam proses *encoding* (melakukan seleksi isu, seleksi penonjolan, seleksi interpretasi dan lain sejenisnya) guna memerankan fungsi *surveillance, correlation dan mobilization*-nya, maka dengan melihat asumsi teori agenda setting tadi, kiranya itu menjadi justifikasi teoritis bahwa apa yang hendak dijawab dalam penelitian ini sebagai termasuk bagian kecil dari upaya

mempelajari media dalam perspektif teori agenda setting. Agenda setting dimaksud, yakni pada tahapan studi agenda media yang terkait dengan *saliency issue* pada tataran media agenda saja.

Selanjutnya, mempelajari bagaimana cara mengetahui kualifikasi media dalam meng-*encoding* pemeranan fungsi-fungsi *surveillance* dan *correlation* serta *mobilization*-nya, yakni pada konteks agenda media yang terkait dengan soal *saliency issue*, maka dalam studi ini akan dilakukan dengan cara berpijak pada formula Lasswell yang dibuatnya pada tahun 1948. Lasswell sendiri dalam merumuskan formulanya waktu itu, yakni untuk kepentingan analisis isi pesan komunikasi politik, khususnya pesan-pesan propaganda, sebagaimana kerap bermunculan di media massa kala itu yang nota bene sarat dengan nuansa situasi peperangan.

Formulanya sendiri berbunyi, siapa, mengatakan apa, dengan saluran yang mana, kepada siapa dan dengan efek yang bagaimana (lihat, Mc Quail dan Windahl, 1985). Formula ini memang sudah relative tua. Ini seiring dengan perkembangan kemajuan ilmu, terutama pada komunikologi yang begitu pesat yang telah banyak memunculkan model-model pendekatan studi komunikasi yang sirkuler.

Meskipun begitu, di samping juga karena dinilai terlalu linier, dalam banyak fenomena komunikasi, kegunaan formula Lasswell tadi tampak masih banyak relevansinya hingga kini. Terutama terhadap fenomena komunikasi massa yang hampir tidak mungkin interaktif seperti media cetak, surat kabar, sebagaimana halnya dengan media yang dijadikan obyek studi dalam penelitian ini, yakni surat kabar nasional Kompas, Rakyat Merdeka, Republika dan Media Indonesia.

### **Metodologi**

Penelitian ini merupakan studi content analysis berbasiskan pada tradisi *agenda setting*. Studi agenda media dalam penelitian ini akan ditelusuri secara terbatas pada fenomena menyangkut konsep-konsep *saliency issue* dan *prominence issue*.

Dengan konsep *saliency issue* dimaksudkan sebagai suatu gejala menyangkut frekuensi pemuatan isu oleh suatu surat kabar terkait fenomena mediasi struktur politik. Sementara *valence issue*, fenomenanya akan dilihat dari bagaimana media menyajikan suatu isu atau melihat dengan cara bagaimana suatu isu menyangkut persoalan struktur politik, disajikan oleh media.

*Recording unit* untuk keperluan penelitian ini yaitu berita dalam kategori *head line* dalam empat surat kabar (Kompas, Rakyat Merdeka, Republika dan Media Indonesia) yang terbit pada edisi Januari 2014. Data dikumpulkan oleh tenaga litkayasa dengan menggunakan *coding sheet* yang sebelumnya telah diujikan tingkat kesepakannya. Hasil pengolahan data langsung di *in put* ke dalam komputer (berlangsung sepanjang Januari 2014) dan diolah melalui program SPSS seri 12,0.

## **PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

Pada hakikatnya, bagian ini isinya berupa jawaban atas pertanyaan, yakni pertanyaan yang telah dirumuskan pada bagian awal penelitian ini. Permasalahan penelitian ini sendiri difokuskan pada dua hal, pertama terkait dengan soal struktur politik dan kedua terkait dengan soal *isue agenda setting*. Terkait dengan rumusan bagian pertama, yaitu: 1) Terkait dengan struktur politik, komponen apa sajakah yang dimediasi oleh organisasi media surat kabar itu?; 2) Komponen-komponen apakah dalam struktur politik yang paling banyak lolos dalam seleksi proses *agenda setting* itu?; 3) Komponen apakah dalam struktur politik yang menjadi sasaran komunikasi dalam HL yang lolos dalam seleksi proses *agenda setting* itu? Sementara terkait dengan rumusan bagian kedua, yakni: 4) Terkait pemediasi struktur politik, pada *Isue* dalam bidang apa sajakah yang paling banyak lolos dalam proses *agenda setting* itu?; dan 5) Dalam *Isue* pada topik apa sajakah komponen-komponen struktur politik itu dimediasi oleh pihak organisasi media surat kabar? Hasil penelitian menyangkut sejumlah persoalan dimaksud, selanjutnya disajikan secara berurutan pada bagian berikut ini:

#### **1. Mediasi Komponen Struktur Politik**

Dalam terminologi ilmu politik, struktur politik yang terkandung dalam sistem politik pada hakikatnya hanya dikenal dua komponen besar, yaitu Suprastruktur politik dan

Infrastruktur politik. Mengamati pemediasiannya dalam surat kabar, antara lain itu bisa dilakukan dengan cara mengobservasi dan mengidentifikasi para nara sumber dalam berita HL itu menurut pengertian masing-masing komponen. Dengan cara ini, maka hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan pemberitaan sebanyak 100 HL, diketahui ada sebanyak 404 nara sumber (pihak) yang mendapat mediasi oleh pihak organisasi media. Dari jumlah tersebut, bagian terbesar mereka (59,16 % = 239) merupakan pihak yang teridentifikasi sebagai pihak yang tergolong sebagai komponen supra struktur politik dalam sistem politik. Sedang sisanya sebesar 40,84 % (165) yakni berasal dari kalangan infra struktur politik. (lihat tabel 1).

**Tabel 1**  
**Sumber Berita Menurut Posisinya dalam Struktur politik**

Komponen Dalam Struktur Politik		Frequency	Percent
Valid	Suprastruktur politik	239	59,16
	Infrastruktur politik	165	40,84
	Total	404	100,00

Sumber : Hasil Olah Data : 2014

Selanjutnya, terkait dengan keragaman pihak yang terkandung dalam masing-masing komponen pada struktur politik, itu terungkap melalui sajian data pada tabel 1a dan 1b sub bab “Pemediasan Ragam Pihak Dalam Komponen Struktur Politik” berikut ini.

## 2. Pemediasan Ragam Pihak Dalam Komponen Struktur Politik

Melihat sajian data tabel 1a, diketahui bahwa para nara sumber yang masuk dalam kategori supra struktur politik itu ternyata jumlahnya mencapai 239 personil. Dari jumlah dimaksud, mediasinya dilakukan organisasi media antara 1-8 kali dalam edisi Januari. Diantara frekuensi penyajian tersebut, maka para nara sumber itu lebih banyak disajikan media dengan satu (1) kali penyajian. Nara sumber lainnya yang mendapat pemediasian lebih dari satu kali, yaitu seperti : Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB); Jubir KPK; Ketua KPK; Ketua Mahkamah Konstitusi ; Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ; Pengamat politik UI; Komisioner KPU; Peneliti LIPI ; Menteri Pekerjaan Umum ; Gubernur Sulawesi Utara ; Pengajar Ilmu Politik Universitas Airlangga ; Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; Wakil Ketua DPR ; Menteri Koordinator Perekonomian ; Anggota DPR Fraksi Demokrat; Ketua Komisi VII DPR ; Menteri Keuangan ; Menteri Perdagangan; Ahli Hidrologi Fakultas Teknik UI; Wakil Gubernur DKI Jakarta; Kepala Staf Angkatan Darat; Direktur Pertamina. Semua pihak dalam komponen suprastruktur tersebut masing-masing dimediasikan oleh pihak media sebanyak dua (2) kali selama bulan Januari 2013. Sementara komponen/pihak yang mendapat pemediasian di atas dua kali dan bahkan mencapai delapan (8) kali, jumlahnya tidak banyak. Dapat disebutkan, mereka ini terdiri dari : Menko Perekonomian (3); Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB (3); Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG (3); Wakil Presiden RI (3); Pakar Hukum Tata Negara Unhas Makassar (3); Menko Kesra (3); Dirut PT Pertamina (3); Vice President Corporate Pertamina (3); Menteri Koordinator-Perekonomian (4); Wakil Ketua KPK (5); Hakim Konstitusi MK (5); Gubernur DKI Jakarta (6); Wakil Menteri Hukum dan HAM (6); Menteri BUMN (7); Juru Bicara KPK (8); Presiden RI (8).

**Tabel 1a**  
**Ragam Komponen Dalam Struktur Politik (Suprastruktur Politik)**  
**Pada Pengagendaan Media Menurut Personil “Sumber Berita”**  
**n : 239**

Ragam Komponen Suprastruktur Politik	Frequency
Anggota Komisi VII DPR (dari Fraksi PDIP)	1
Ketua Bawaslu	1
Sekretaris Komite Ekonomi Nasional (KEN)	1
Kepala Pusat Komunikasi Kementerian ESDM	1
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri	1
Wali kota Tangerang	1
Dosen Senior Kajian Timur Tengah dari UGM	1
Gubernur Sulut	1
Pelaksana Harian BPBD Cilacap	1
Kepala Subdit Informasi BMKG	1
Kepala Dinas Bina Marga dan ESDM Kabupaten Kudus	1
Kepala Teknis Hujan Buatan BPPT	1
Kepala BNPB	1
Kepala Pusat Komunikasi Kementerian Pekerjaan Umum	1
Kepala Sub Bidang Tanggap Darurat (BPBD) Sulut	1
Kepala Bidang Humas Pemda Tanah Karo	1
Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan	1
Bupati Banyumas	1
Kasudin PU Jalan Jakarta Barat	1
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sulut	1
Wakil Presiden Komunikasi Perusahaan PT Pertamina	1
Kepala Pusat BMKG	1
Anggota DPR (dari PPP)	1
Anggota Banggar DPR RI	1
Operator pompa Waduk Pluit	1
Koordinator Taruna Siaga Bencana Kabupaten Subang	1
Wakapolres Subang	1
Kapolri	1
Ketua Komisi I DPR	1
Wakil Presiden Komunikasi Perusahaan PT. Pertamina	1
Hakim Konstitusi	1

<b>Ragam Komponen Suprastruktur Politik</b>	<b>Frequency</b>
Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	1
Petugas BPBD Provinsi Sulawesi Utara	1
Ketua Pusat Studi kebumihan, Bencana, dan Perubahan Iklim ITS Surabaya	1
Juru Bicara Presiden	1
Menteri Lingkungan Hidup	1
Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1
Ketua Pusat Riset Kesehatan untuk Krisis dan Bencana UI	1
Ketua DPR	1
Kapus Komunikasi Kementerian Perhubungan	1
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Banyumas	1
Hakim Pengadilan Tipikor	1
Kepala Informasi Pusdalop BPBD DKI Jakarta	1
Kepala Unit Teknik Hujan Buatan BPPT	1
Kepala SMAN 2 Denpasar Bali	1
Gubernur Jateng	1
Dirut Perum Bulog	1
Menteri Pertanian	1
Menteri Sekretaris Negara	1
Kepala Seksi Informasi Pusat Pengendalian Operasional BPBD DKI Jakarta	1
Anggota DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera	1
Menteri Kehutanan	1
Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan	1
Ketua MK	1
Kepala Pusat meteorologi	1
Komisioner Komnas HAM	1
Anggota Komisi V DPR RI	1
Kepala Pelaksana BPDB DKI Jakarta	1
Bupati Tangerang	1
Staf Khusus Presiden Bidang Informasi Publik	1
Gubernur Jawa Barat	1
Sekretaris Kecamatan Pamanukan	1
Ahli Lingkungan UI	1
Pakar Hukum UII	1
Wakil Ketua DPR RI	1
Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kab Sukabumi	1

<b>Ragam Komponen Suprastruktur Politik</b>	<b>Frequency</b>
Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kab Sukabumi	1
Pakar lingkungan dari Univ Diponegoro	1
Ketua Komisi II DPR	1
Polda Metro Jaya	1
Menko Polhukam	1
Wakil Presiden	1
Wagub Prov Banten	1
Pengamat Politik LIPI	1
Jaksa KPK	1
Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian	1
Pakar Semiotika Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Teknologi Bandung	1
Anggota DPR	1
Dirut Pertamina	1
Dirlantas dan Angkutan Jalan Dirjen Perhubungan Darat	1
Menko Bidang Perekonomian	1
Gubernur DKI	1
Kabid Sumber Daya Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kab Kerawang	1
Wakil Ketua MPR	1
Kepala Pusat Data Informasi BNPB	1
Juru bicara KPK	1
Guru Besar Hukum Tata Negara Unpad Bandung	1
VP LPG and Gas Product Pertamina	1
Wakil Ketua Komisi I DPR	1
Ketua Badan Legislasi DPR	1
Wakil Presiden Komunikasi Korporat PT Pertamina (Persero)	1
Pakar geologi lingkungan dari UGM	1
Wakil Menteri Pekerjaan Umum	1
Juru Bicara Wakil Presiden	1
Anggota BPK	1
Kepala Bidang Informatika dan Pengendalian BPBD DKI Jakarta	1
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya	1
Asisten II Sekda Pemkab Tanah Karo	1
Ketua Komnas HAM	1
Kepala Kepolisian Resor Kota Surabaya	1
Kepala Humas Pekerjaan Umum DKI Jakarta	1

<b>Ragam Komponen Suprastruktur Politik</b>	<b>Frequency</b>
Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta	1
Staf Khusus Presiden Bidang Informasi	1
Dirjen Sumber Daya air Kemen PU	1
Mantan Wakil Presiden	1
Pakar Penanggulangan Bencana UI	1
Kepala Pelaksana BPBD Bangkalan	1
Menteri ESDM	1
Pakar Psikologi Politik dari Universitas Indonesia	1
Wakil Menteri Perdagangan	1
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	1
Pengamat Ekonomi Universitas Brawijaya	1
Kepala UPT Hujan Buatan BPPT	1
Ketua Pusat Studi Otak dan Perilaku Sosial Universitas Sam Ratulangi	1
Anggota Komisi X DPR	1
Kabag Humas Pemkab Banyumas	1
Kapolres Bogor	1
Kepala BPBD Sulut	1
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD)	1
Pengamat Perkotaan Universitas Sam Ratulangi	1
Juru Bica KPK	1
Walikota Tangerang	1
Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi UGM	1
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	2
Jubir KPK	2
Ketua KPK	2
Ketua Mahkamah Konstitusi	2
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	2
Pengamat politik UI	2
Komisioner KPU	2
Peneliti LIPI	2
Menteri Pekerjaan Umum	2
Gubernur Sulawesi Utara	2
Pengajar Ilmu Politik Universitas Airlangga	2
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral	2
Wakil Ketua DPR	2
Menteri Koordinator Perekonomian	2
Anggota DPR Fraksi Demokrat	2
Ketua Komisi VII DPR	2

<b>Ragam Komponen Suprastruktur Politik</b>	<b>Frequency</b>
Menteri Keuangan	2
Menteri Perdagangan	2
Ahli Hidrologi Fakultas Teknik UI	2
Wakil Gubernur DKI Jakarta	2
Kepala Staf Angkatan Darat	2
Direktur Pertamina	2
Menko Perekonomian	3
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB	3
Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG	3
Wakil Presiden RI	3
Pakar Hukum Tata Negara Unhas Makassar	3
Menko Kesra	3
Dirut PT Pertamina	3
Vice President Corporate Pertamina	3
Menteri Koordinator Perekonomian	4
Wakil Ketua KPK	5
Hakim Konstitusi MK	5
Gubernur DKI Jakarta	6
Wakil Menteri Hukum dan HAM	6
Menteri BUMN	7
Juru Bicara KPK	8
Presiden RI	8
Total	239

Sumber : Hasil Olah Data : 2014

Selanjutnya terkait dengan ragam pihak yang dimediasi oleh redaksi dalam komponen infrastruktur politik. Data menyangkut hal ini disajikan dalam tabel 1b berikut. Dari tabel tersebut diketahui ada 165 pihak yang mendapat pemediaan organisasi redaksi dalam pengagendaan mereka dalam edisi Januari 2013. Ke-165 pihak yang tergolong dalam komponen infrastruktur politik tersebut, umumnya hanya mendapat satu kali pemediasian dalam pengagendaan mereka itu. Namun demikian, terdapat juga pihak-pihak yang pemediannya itu dilakukan organisasi redaksi antara 2 – 6 kali dalam Januari 2013. Mereka ini terdiri dari : Adik dari Andi Mallarangeng (Mantan Menpora) (2); Pengamat perkotaan (2); Peserta Konvensi Capres Partai Demokrat (2); Ketua DPP Partai Golkar (2); Warga Kota Manado (2); Ketua Umum Partai Nasdem (2); Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Nasdem (2); Mantan Sekretaris Menteri BUMN (2); Peneliti ICW (2); Pemohon Uji Materi UU (3); Juru Bicara PPI(3); Pakar Hukum Tata Negara (3); Pengamat Kebijakan Publik (3) ; Pengungsi(3); Ketua Presidium PPI (4); dan Kuasa Hukum Anas Urbaningrum (6). (Lihat tabel 1b).

**Tabel 1b**  
**Ragam Komponen Dalam Struktur Politik (Infrastruktur Politik)**  
**Pada Pengagendaan Media Menurut Personil “Sumber Berita”**  
**n 165**

<b>Ragam Komponen Infrastruktur Politik</b>	<b>Frequency</b>
Kepala Desa Kutabawa, Purbalingga	1
Siswa Kelas XII IPA 1 SMAN 2 Denpasar	1

Ragam Komponen Infrastruktur Politik	Frequency
Pengacara Karen	1
Mantan Ketua Umum PBNU	1
Ketua Umum Gerindra	1
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra	1
Pedagang sayuran di Pasar Baru Indramayu	1
Dokter relawan	1
Pengacara Rubi Ruribiandini	1
Ketua Himpunan Perawat Gawat Darurat dan Bencana Indonesia	1
Direktur Eksekutif Indo Barometer	1
Direktur Eksekutif Charta Politika	1
Sekretaris Fraksi Partai Gerindra (DPR)	1
Politisi Partai Hanura	1
Peternak Ayam Pedaging	1
Sekretaris Jenderal PKS	1
Peneliti Indo Barometer	1
Istri Anas Urbaningrum	1
Warga, Kota Manado	1
Direktur Eksekutif Pusat Reformasi Konstitusi dan Pemilu (correct)	1
Pedagang Telur	1
Warga Sinabung	1
Warga Karawang	1
Ketua Umum Partai Gerindra	1
Pengamat Ekonomi	1
Petambak produksi udang dan Bandeng	1
Direktur Eksekutif WALHI	1
Sekretaris Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat	1
Ketua Harian Partai Demokrat	1
Kuasa hukum Chairun Nisa	1
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra	1
Direktur Pusat Studi Manajemen Bencana Universitas Pembangunan Nasional "Veteran", Yogyakarta	1
Ketua Fraksi Partai Golkar	1
Wakil Sekjen PKS	1
Ketum Asosiasi Logistik dan Forwardesr Indonesia	1
Bekas Pengacara KPK	1
Loyalis Aktivistis PPI	1
Gubernur Massachusetts	1
Warga	1
Kuasa hukum Akil Mochtar	1

<b>Ragam Komponen Infrastruktur Politik</b>	<b>Frequency</b>
Anggota Majelis Syuro PKS	1
Direktur Komunikasi ISC	1
Wakil Sekjen PDIP	1
Komite Aksi Pemenangan Pemilu DPP PBB	1
Kuasa Hukum Rudy Rubiandini	1
Supir truk tronton	1
Politisi Golkar	1
Sekretaris PT Tatanusa Garmindo	1
Ketua Umum PBNU	1
Ketua Bidang Media dan Komunikasi Politik Partai Nasdem	1
Kepala Ombudsman Perwakilan Bali	1
Sekjen Partai Nasdem	1
Politisi Golkar Sumatra Utara	1
Komandan Resque Aksi Cepat Tanggap	1
Mantan Menteri Hukum dan Hak azasi Manusia	1
Pakar Lingkungan Hidup	1
Warga Sidoarum, Godean Yogyakarta	1
Pengacara Anas Urbaningrum	1
Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA)	1
Pedagang Elpiji Polewali Mandar, Sulawesi Selatan	1
Sekjen Golkar	1
Ketua Fraksi PKS	1
Ketua Asosiasi Bawang Merah Indonesia	1
Ketua Koperasi Tani Baga Desa Sukatani, Kecamatan Cilamaya Wetan	1
Ketua KPU	1
Kepala Kelompok Teknisi Stasiun Meteorologi Cilacap	1
Psikolog Sosial	1
Wakil Sekjen PDI-P	1
Kepala Cabang PT Dirgahayu Express Cabang Tanah Abang	1
Ketua Fraksi Hanura DPR	1
Juru Bicara Partai Demokrat	1
Relawan PMI	1
Deputi Komisioner OJK	1
Pengamat Kebijakan Publik	1
Kepala Bidang Advokasi Partai Gerindra	1
Anggota Partai Demokrat	1
Wakil Ketua Umum DPP Demokrat	1
Sekjen Partai Demokrat	1
Pakar hukum tata negara	1
Politisi Partai Golkar	1

Ragam Komponen Infrastruktur Politik	Frequency
Pedagang di Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang	1
Ketua DPP PAN	1
Wakil Sekjen Apindo	1
Warga Jepara	1
Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah	1
Pendekar Hukum	1
Pakar kebijakan publik	1
Ketua Harian YLKI	1
Karyawan Swasta	1
Fungsionaris Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI)	1
Pengamat Energi	1
Peneliti Indonesia Legal Roundtable	1
Ketua PP Muhammadiyah	1
-Kepala Dinas PU DKI Jakarta	1
Ketua Umum Serikat Petani	1
Pelaku Pengoplosan Elpiji 12 Kg	1
Warga Cilacap	1
Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarders Indonesia (ALPI)	1
Sekjen PDIP	1
Direktur Pusat Studi Manajemen Bencana UPN Veteran Yogyakarta	1
Anggota Dewan Kehormatan Partai Demokrat	1
Jubir PPI (Perhimpunan Pergerakan Indonesia)	1
Presiden Partai Kesejahteraan Sosial (PKS)	1
Warga Jalan Ngagel Rejo Kidul Surabaya Jawa Timur	1
Gubernur Minnesota AS	1
Politikus Partai Golkar	1
Wakil Sekjen Partai Hanura	1
Manajer Penanganan Bencana Nasional WALHI	1
Pakar Hukum Pencucian Uang	1
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kebumen	1
Mantan Gubernur DKI Jakarta	1
Ketua Kaukus Anti Korupsi DPD	1
Sekretaris Jenderal PPP	1
Ketua Umum PMI	1
Ketua Sub Divisi tanggap Darurat dan Pemulihan PMI	1
Ketua RT 027 Perumahan Griya Ayu Utama Kota Indramayu	1

<b>Ragam Komponen Infrastruktur Politik</b>	<b>Frequency</b>
Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1
Mantan Gubernur DKI	1
Ketua Umum Golkar	1
Pendekar Kemajuan Ekonomi	1
Pakar Hukum, Pengamat Hukum Pidana	1
Ketua Tanggap Darurat Bencana Gunung Sinabung	1
Adik dari Andi Mallarangeng (Mantan Menpora)	2
Pengamat perkotaan	2
Peserta Konvensi Capres Partai Demokrat	2
Ketua DPP Partai Golkar	2
Warga Kota Manado	2
Ketua Umum Partai Nasdem	2
Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Nasdem	2
Mantan Sekretaris Menteri BUMN	2
Peneliti ICW	2
Pemohon Uji Materi UU	3
Juru Bicara PPI	3
Pakar Hukum Tata Negara	3
Pengamat Kebijakan Publik	3
Pengungsi	3
Ketua Presidium PPI	4
Kuasa Hukum Anas Urbaningrum	6
Total	165

Sumber : Hasil Olah Data : 2014

### 3) Ragam Komponen Dalam Struktur Politik Pada Pengagendaaan Media Menurut Predikat/Status “Sumber Berita”

Dalam kaitan keragaman komponen dalam konteks predikat/status sumber berita pada pemberitaan headline, maka dengan mengacu pada data tabel 2, diketahui bahwa para nara sumber itu terkategoriakan menjadi sembilan (9) komponen, yakni mulai dari komponen lembaga tinggi negara hingga komponen anggota masyarakat. Dari sebanyak 404 personil yang tersebar pada kesembilan komponen tadi, maka diketahui nara sumber yang tergolong ke dalam kategori Lembaga Pemerintah (Setingkat Menteri s/d Kelurahan) merupakan yang paling banyak dianalisis pihak media surat kabar, proporsinya mencapai 131 (32.0) sumber berita. Sementara komponen anggota masyarakat jumlahnya diposisi kedua dengan porsi 22,9 % (94) nara sumber dan ketiga diikuti oleh penempatan sumber berita yang berasal dari komponen Lembaga Tinggi Negara (Presiden, DPR, MPR, MK, MA, KY) dengan proporsi sebanyak 12,2 % (50) nara sumber. Sedang sumber berita pada komponen lain yang tampak jumlahnya tidak bisa dianggap kecil yaitu sumber berita pada komponen Lembaga Independen Negara; UPT-UPT dan Lembaga-lembaga Parpol dengan proporsi pemunculan dalam surat kabar berkisar 34-40 kali. Sisanya dilakukan media untuk menempatkan para nara sumber yang berasal dari komponen lain yang jumlahnya relatif sedikit, yakni berkisar 1-10 kali pemunculan. (Selengkapnya, lihat tabel 2).

Jika sebelumnya dipaparkan tentang “Ragam Komponen Dalam Struktur Politik Pada Pengagendaaan Media Menurut Predikat/Status “Sumber Berita”, maka pada bagian ini akan ditelusuri lebih jauh mengenai komponen-komponen dalam struktur politik tadi.

Telusuran ragam komponen dalam struktur politik tersebut akan dilakukan berdasarkan keterkaitan mereka dengan masalah “Penyelenggaraan Negara”. Data hasil penelitian tentang hal ini sendiri disajikan dalam tabel 3 berikut. Berdasarkan data tabel 3 dimaksud, ternyata para nara sumber itu lebih dominan (61.5 %= 252) berasal dari kalangan yang terlibat dengan masalah penyelenggaraan negara (Pemerintah). Dengan kata lain, mereka itu lebih banyak (61.5 %) berasal dari kalangan penyelenggara negara (aparatur negara= pemerintah). Selebihnya dengan jumlah yang tentu lebih sedikit (37,1 % =152) yaitu berasal dari kalangan non pemerintah. Dengan demikian, dalam konteks proses *agenda setting*, dapat dikatakan bahwa pihak media itu secara relatif ternyata cenderung lebih “menyuarakan “ suara dari “*Top Down*” ketimbang “*Bottom Up*”. Di sisi lain ini tentu dapat berarti pula bahwa dalam pengagendannya media itu tampak cenderung lebih mengutamakan arus informasi yang berasal dari pemerintah dari pada arus informasi yang berasal dari pihak non pemerintah.

Menyangkut identitas nama para pihak yang dijadikan sebagai nara sumber dalam pengagendaaan media guna ‘penyuaraan’ opini, sikap atau ekspresi dari komponen-komponen struktur politik dalam kerangka sistem politik, maka media terlihat cenderung hanya 1- 4 kali umumnya dalam menjadikan pihak-pihak itu sebagai nara sumber. Sementara pihak-pihak yang mendapat kesempatan di atas 4 kali, jumlah lebih kecil, sekitar (19 % =78). Selanjutnya, dari porsi tersebut, nama-nama nara sumber itu ternyata semuanya menyangkut nama-nama pengelola pemerintah ini. Dari sejumlah nama dimaksud, setidaknya mereka mendapat 4 kali kesempatan dalam proses pengagendaaan media. Bahkan diantaranya ada yang mendapat kesempatan 8 kali dari media terkait kepentingan mereka dalam proses *agenda setting*. Secara lengkap menyangkut nama nara sumber tersebut, disajikan dalam tabel 4. Khusus menyangkut nara sumber dari pihak pemerintah yang menonjol dalam pengagendaaan media pada edisi Januari, dapat dilihat dalam tabel 4a berikut :

**Tabel 2**  
**Ragam Komponen Dalam Struktur Politik Pada Pengagendaaan Media**  
**Menurut Predikat/Status “Sumber Berita”**  
**n: 410**

Predikat/Status “Sumber Berita”	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	6	1.5	1.5	1.5
<b>Lembaga Tinggi Negara</b> (Presiden, DPR, MPR, MK, MA, KY).	50	12,2	12,2	13.7
<b>Lembaga Independen Negara</b> (KPU, KPI, Komisi Perempuan, dll..)	34	8.3	8.3	22.0
<b>Lembaga Legislatif</b> (DPRD I, DPRD II)	1	.2	.2	22.2
<b>Lembaga NGO</b> (LSM-LSM)	10	2.4	2.4	24.6
<b>Lembaga Asosiasi/Serikat-serikat</b> (SBI, dll..)	6	1.5	1.5	26.1
<b>Lembaga pemerintah setingkat Kementerian s/d Kelurahan)</b>	131	32.0	32.0	58.0

	<b>UPT-UPT</b> (misal: Bendungan/Pintu Air Katulampa)	38	9.3	9.3	67.3
	<b>Lembaga-lembaga Parpol</b> (parpol angg legislatif/bukan)	40	9.8	9.8	77.1
	<b>Anggota masyarakat</b> (individu atau mewakili kel. masyarakat)	94	22.9	22.9	100.0
Total		404	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Olah Data : 2014

**Tabel 3**  
**Ragam Komponen Dalam Struktur Politik Pada Pengagendaaan Media Menurut Keterkaitan “Sumber Berita” dengan Penyelenggaraan Negara n : 410**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Pemerintah	252	61.5	62.4	62.4
	Non pemerintah	152	37.1	37.6	100.0
	Total	404	98.5	100.0	
Missing	System	6	1.5		
Total		410	410	100.0	

Sumber : Hasil Olah Data : 2014

**Tabel 4**  
**Ragam Komponen Dalam Struktur Politik Pada Pengagendaaan Media Menurut Nama “Sumber Berita” n :410**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid		6	1.5	1.5	1.5
	Abdul Hakam Naja	1	.2	.2	1.7
	Abetnego Tarigan	1	.2	.2	2.0
	Abraham Samad	2	.5	.5	2.4
	Aburizal Bakrie	1	.2	.2	2.7
	Achmad Husein	1	.2	.2	2.9
	Ade Irawan	1	.2	.2	3.2
	Agung Laksono	3	.7	.7	3.9
	Agus Pambagio	3	.7	.7	4.6
	Ahmad Heryawan	1	.2	.2	4.9
	Ahmad Rifai	1	.2	.2	5.1

Ahmad Suryanto	1	.2	.2	5.4
Ahmad yani	1	.2	.2	5.6
Ahmad Zainuddin	1	.2	.2	5.9
Ahmed Zaki Iskandar	1	.2	.2	6.1
Airlangga Pribadi	2	.5	.5	6.6
Akbar Tandjung	1	.2	.2	6.8
AKBP Asep Syafrudin	1	.2	.2	7.1
Ali Masykur Musa	1	.2	.2	7.3
Ali Mundakir	6	1.5	1.5	8.8
Amelia Kimin	1	.2	.2	9.0
Amin Widodo	1	.2	.2	9.3
Anas Urbaningrum	4	1.0	1.0	10.2
Andhika Purbo Swasono	1	.2	.2	10.5
Andi Zulkarnain Mallarangeng (Choel)	1	.2	.2	10.7
Andrianov Chaniago	2	.5	.5	11.2
Andry Kurniawan	1	.2	.2	11.5
Anggun Permana Sidiq	1	.2	.2	11.7
Anies Baswedan	1	.2	.2	12.0
Anis Matta	1	.2	.2	12.2
Anita Wardhana	1	.2	.2	12.4
Anton	1	.2	.2	12.7
Anton Sihombing	1	.2	.2	12.9
Ari Yusnita	1	.2	.2	13.2
Arief Budimanta	1	.2	.2	13.4
Arief Hidayat	1	.2	.2	13.7
Arief R Wismansyah	2	.5	.5	14.1
Arief Supriadi	1	.2	.2	14.4
Arifrin	1	.2	.2	14.6
Asep Warlan Yusuf	1	.2	.2	14.9
Asraf Ali	1	.2	.2	15.1
Athiyah Laila	1	.2	.2	15.4
Aviliani	1	.2	.2	15.6
Aziz Syamsudin	1	.2	.2	15.9
Balthasar Kambuaya	1	.2	.2	16.1
Bambang Musyawardana	1	.2	.2	16.3
Bambang S Ervan	1	.2	.2	16.6
Bambang Soesatyo	1	.2	.2	16.8
Bambang Surya Putra	2	.5	.5	17.3
Bambang Widjojanto	5	1.2	1.2	18.5

Basuki Tjahaja Purnama	2	.5	.5	19.0
Bayu Krisnamurthi	1	.2	.2	19.3
Boediono	4	1.0	1.0	20.2
Brigadir Jenderal (Brigjen) TNI Sisriadi	1	.2	.2	20.5
Brigjen Boy Rafli Amar	1	.2	.2	20.7
Carel Ticalu	2	.5	.5	21.2
Caroline	1	.2	.2	21.5
Chatib Basri	1	.2	.2	21.7
Dahlan Iskan	8	2.0	2.0	23.7
Danis H Sumadilaga	1	.2	.2	23.9
Darmawan Prasodjo	1	.2	.2	24.1
Denny Indrayana	6	1.5	1.5	25.6
Deny Hariyatna	1	.2	.2	25.9
Deval Patrick	1	.2	.2	26.1
Dewi Susilowati	1	.2	.2	26.3
Didi Supriyanto	1	.2	.2	26.6
Djoko Kirmanto	2	.5	.5	27.1
Djoko Suyanto	1	.2	.2	27.3
Dolfi OFP	1	.2	.2	27.6
Dr. Yenti Garnasih	1	.2	.2	27.8
Dumoli Fredi Pardede	1	.2	.2	28.0
Dwikorita Karnawati	1	.2	.2	28.3
Edhie Baskoro Yudhoyono	1	.2	.2	28.5
Edhy Prabowo	1	.2	.2	28.8
Edi Gunedi	1	.2	.2	29.0
Edi Junaedi	1	.2	.2	29.3
Effendi Ghazali	3	.7	.7	30.0
Eko Teguh Paripurno	2	.5	.5	30.5
Ely Kusumastuti	1	.2	.2	30.7
Erwin Natosmal Oemar	1	.2	.2	31.0
Fadli Zon	1	.2	.2	31.2
Fadlil Ahmad Sumadi	2	.5	.5	31.7
Fahri Hamzah	1	.2	.2	32.0
Fajrul Falaakh	1	.2	.2	32.2
Farid Hasbi	1	.2	.2	32.4
Fauzi	1	.2	.2	32.7
Ferry Mursidan Baldan	2	.5	.5	33.2
Firdaus Ali	2	.5	.5	33.7
Firman Noor	1	.2	.2	33.9
Firman Wijaya	5	1.2	1.2	35.1

Firmanzah	1	.2	.2	35.4
Franky Sibarani	1	.2	.2	35.6
Ganjar Pranowo	1	.2	.2	35.9
Gigih WH Irianto	1	.2	.2	36.1
Gita Wirjawan	3	.7	.7	36.8
Habiburokhman	1	.2	.2	37.1
Hadjriyanto Y Thohari	1	.2	.2	37.3
Haedar Nashir	1	.2	.2	37.6
Haji Agus	1	.2	.2	37.8
Hajriyanto Thohari	2	.5	.5	38.3
Hamdan Zoelva	3	.7	.7	39.0
Hamdi Muluk	1	.2	.2	39.3
Hari Tirta Jatmiko	1	.2	.2	39.5
Harjono	1	.2	.2	39.8
Harry Sarundajang	1	.2	.2	40.0
Haryanto	1	.2	.2	40.2
Hasto Kristiyanto	2	.5	.5	40.7
Hatta Rajasa	10	2.4	2.4	43.2
Hendrawan	1	.2	.2	43.4
Hendri Saparini	2	.5	.5	43.9
Henry Saragi	1	.2	.2	44.1
Hermanto Dardak	1	.2	.2	44.4
Heru Lelono	2	.5	.5	44.9
Heru Widodo	3	.7	.7	45.6
Hidayat Nur Wahid	2	.5	.5	46.1
Hifdzil Alim	1	.2	.2	46.3
Hotma Simanjuntak	1	.2	.2	46.6
Husni Kamil Manik	1	.2	.2	46.8
I Gede Pasek Suardika	1	.2	.2	47.1
I Wayan Sudirta	1	.2	.2	47.3
Ida Budhiati	1	.2	.2	47.6
Idrus Marham	1	.2	.2	47.8
Ignatius Mulyono	1	.2	.2	48.0
Imam Putra Sidin	1	.2	.2	48.3
Indra	1	.2	.2	48.5
Irman Gusman	1	.2	.2	48.8
Irman Putra Sidin	2	.5	.5	49.3
Iskandar Zulkarnaen	2	.5	.5	49.8
Jajang	1	.2	.2	50.0
Jakob Rakian	1	.2	.2	50.2
Janus Ginting	1	.2	.2	50.5
JE Sahetapi	1	.2	.2	50.7
Jenderal Budiman	2	.5	.5	51.2
Jenderal Sutarman	1	.2	.2	51.5
Jero Wacik	3	.7	.7	52.2

Jhonson Tarigan	1	.2	.2	52.4
Johan Budi	12	2.9	2.9	55.4
Joko Widodo	7	1.7	1.7	57.1
Julian Aldrin Pasha	1	.2	.2	57.3
Jusuf Kalla	1	.2	.2	57.6
Juwari	1	.2	.2	57.8
Karen Agustiawan	6	1.5	1.5	59.3
Kasandra Putranto	1	.2	.2	59.5
Ketut Sunarta	1	.2	.2	59.8
KH. Hasyim Muzadi	1	.2	.2	60.0
KH. Said Agil Siroj	1	.2	.2	60.2
Kombes Rikwanto	1	.2	.2	60.5
Kombes Setija Junianta	1	.2	.2	60.7
Kompol I Putu Yuni Setiawan	1	.2	.2	61.0
Kristian Lawtongan	1	.2	.2	61.2
L. Bangun	1	.2	.2	61.5
Latief Adam	1	.2	.2	61.7
M Chatib Basri	1	.2	.2	62.0
M Jusuf Kalla	1	.2	.2	62.2
M Qodari	1	.2	.2	62.4
M. Qodari	1	.2	.2	62.7
Mahfud MD	1	.2	.2	62.9
Mahfudz Siddiq	1	.2	.2	63.2
Makmun Murod	4	1.0	1.0	64.1
Maneger Nasution	1	.2	.2	64.4
Manggas Rudi Siahaan	2	.5	.5	64.9
Margarito Kamis	1	.2	.2	65.1
Maria Farida	2	.5	.5	65.6
Mark Dayton	1	.2	.2	65.9
Marwan Djafar	1	.2	.2	66.1
Marzuki Alie	1	.2	.2	66.3
Masykurudin Hafidz	1	.2	.2	66.6
Mohammad Hasan	1	.2	.2	66.8
Mondastri Korib Sudaryo	1	.2	.2	67.1
Muhammad	1	.2	.2	67.3
Muhyidin	1	.2	.2	67.6
Mukri Friatna	1	.2	.2	67.8
Mulyono R Prabowo	2	.5	.5	68.3
Mulyono Rahardi Prabowo	3	.7	.7	69.0
Nirwono Yoga	2	.5	.5	69.5
Noldy Liow	2	.5	.5	70.0

Nur Ainun Ginting	1	.2	.2	70.2
Nurhayati Assegaf	1	.2	.2	70.5
Patrice Ria Capella	1	.2	.2	70.7
Permadi	1	.2	.2	71.0
Prasetyo Budi W	1	.2	.2	71.2
Primus Yustisio	1	.2	.2	71.5
Priyo Budi Santoso	2	.5	.5	72.0
Prof Mudzakir	1	.2	.2	72.2
Prof. Budiyanatna	2	.5	.5	72.7
Prof. Sudharto P Hadi	1	.2	.2	72.9
Prof. Suhardi	1	.2	.2	73.2
Purwanto	1	.2	.2	73.4
Pusat Manajemen Lalu Lintas Data (TMC) Polda Metro Jaya	1	.2	.2	73.7
Rano Karno	1	.2	.2	73.9
Ratidin	1	.2	.2	74.1
Ratna	1	.2	.2	74.4
Refly Harun	1	.2	.2	74.6
Rendy Rompas	1	.2	.2	74.9
Rini	1	.2	.2	75.1
Risalwan Habduy Lubis	1	.2	.2	75.4
Rizal Mallarangeng	1	.2	.2	75.6
Robert Endi Jaweng	1	.2	.2	75.9
Romahurmuziy	1	.2	.2	76.1
Rudy Alfonso	2	.5	.5	76.6
Ruhut Sitompul	1	.2	.2	76.8
Rusdi A Bakar	1	.2	.2	77.1
Saan Mustofa	1	.2	.2	77.3
Saberina	1	.2	.2	77.6
Saberina Tarigan	1	.2	.2	77.8
Said Didu	2	.5	.5	78.3
Salah Husein	1	.2	.2	78.5
Saldi Isra	1	.2	.2	78.8
Saleh Abdulrahman	1	.2	.2	79.0
Saleh Husin	1	.2	.2	79.3
Sama'ni Intakorisi	1	.2	.2	79.5
Samsul Maarif	1	.2	.2	79.8
Sarifuddin Sudding	1	.2	.2	80.0
Setrawarga	1	.2	.2	80.2
Setyo Wargono	1	.2	.2	80.5
SH Sarunjang	1	.2	.2	80.7
Shidiq	1	.2	.2	81.0
Sigit Pamungkas	1	.2	.2	81.2
Sinyo H Sarundajang	1	.2	.2	81.5

Siska Herawati	1	.2	.2	81.7
Siswono	1	.2	.2	82.0
Siti Mutiah	1	.2	.2	82.2
Siti Noor Laila	1	.2	.2	82.4
Siti Zuhro	1	.2	.2	82.7
Slamet	1	.2	.2	82.9
Sohibul Iman	1	.2	.2	83.2
Sri Henni Setiawati	1	.2	.2	83.4
Sri Sajekti	1	.2	.2	83.7
Suaidi Marasabessy	1	.2	.2	83.9
Sudi Silalahi	1	.2	.2	84.1
Sugito	1	.2	.2	84.4
Suhardi	1	.2	.2	84.6
Suhartati	1	.2	.2	84.9
Supriyanti	1	.2	.2	85.1
Supriyanto	1	.2	.2	85.4
Surya Paloh	2	.5	.5	85.9
Susilo Bambang Yudhoyono	8	2.0	2.0	87.8
Sutan Batoegana	1	.2	.2	88.0
Sutan Bhatoegana	1	.2	.2	88.3
Sutarto Alimoeso	1	.2	.2	88.5
Sutiyoso	3	.7	.7	89.3
Sutopo Purwo Nugroho	8	2.0	2.0	91.2
Syamsul Maarif	2	.5	.5	91.7
Syarifuddin Hasan	1	.2	.2	92.0
Tama S Langkum	1	.2	.2	92.2
Tamsil Sjoekoer	1	.2	.2	92.4
Tarsoen Waryono	1	.2	.2	92.7
Taufik Ridho	1	.2	.2	92.9
Taufiq Pasiak	1	.2	.2	93.2
TB Hasanuddin	1	.2	.2	93.4
Teguh Wardoyo	1	.2	.2	93.7
Tia Kurniawan	1	.2	.2	93.9
Tjahyo Kumolo	1	.2	.2	94.1
Toni Afandi	1	.2	.2	94.4
Toto	1	.2	.2	94.6
Tri Dianto	1	.2	.2	94.9
Triksono Saragih	1	.2	.2	95.1
Trimedya Panjaitan	1	.2	.2	95.4
Tulus Abadi	1	.2	.2	95.6
Tumpal Daniel	1	.2	.2	95.9
Umar Ibnu Khottob	1	.2	.2	96.1
Undoro Kasih Angroho	1	.2	.2	96.3
Usman Susilo	1	.2	.2	96.6
Veronica Kumurur	2	.5	.5	97.1

	Wahid Hidayat	1	.2	.2	97.3
	Warta	1	.2	.2	97.6
	Winarno Tohir	1	.2	.2	97.8
	Wiwin	1	.2	.2	98.0
	Yanuar	1	.2	.2	98.3
	Yasraf Amir Pialang	1	.2	.2	98.5
	Yopie Hidayat	1	.2	.2	98.8
	Yunarto Wijaya	1	.2	.2	99.0
	Yusril Ihza Mahendra	2	.5	.5	99.5
	Yuyu Ngila	1	.2	.2	99.8
	Zulkifli Hasan	1	.2	.2	100.0
	Total	410	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Olah Data : 2014

**Tabel 4a**  
**Nara Sumber Menurut Nama**

Nama Nara sumber	f
Hatta Rajasa	10
Johan Budi	12
Dahlan Iskan	8
Susilo Bambang Yudhoyono	8
Sutopo Purwo Nugroho	8
Karen Agustiawan	6
Denny Indrayana	6
Ali Mundakir	6
Bambang Widjojanto	5
Firman Wijaya	5
Boediono	4

Sumber : Hasil Olah Data : 2014

#### 4) Komponen struktur politik yang menjadi sasaran komunikasi Nara Sumber

Terkait dengan sasaran komunikasi dari para nara sumber yang dijadikan komunikator oleh media dalam pengagendannya, maka hasil penelitiannya disajikan dalam tabel 5, 6, dan 7.

Berkaitan dengan data tabel 5, yakni menyangkut ‘Sasaran komunikasi Nara Sumber dalam HL Menurut Komponen dalam Struktur Politik’, memperlihatkan bahwa sasaran komunikasi itu ternyata lebih banyak berasal dari komponen suprastruktur politik. Proporsi komponen ini sebanyak 44.1 % (181) dalam pengagendaan media edisi Januari 2014. Besarannya berselisih lebih dari 50 % dibandingkan dengan proporsi komponen infrastruktur politik yang frekuensi pemunculannya sebanyak 85 kali (20.7%). Dalam proses pengagendaan yang demikian, pihak-pihak yang menjadi sasaran komunikasi dari para nara sumber itupun, diketahui lebih banyak yang jelas sifatnya<sup>12</sup>. Proporsinya yaitu sebanyak 266 kali pemunculan atau 64.9 %. Sementara proporsi yang sasaran komunikasinya tidak jelas itu lebih sedikit jumlahnya, yaitu sebanyak 144 pemunculan atau 35.1 %. (lihat tabel 6).

Masih terkait dengan persoalan kejelasan sasaran komunikasi tadi, jika ditelusuri lebih jauh, dalam hal ini menyangkut Status/predikat Sasaran komunikasi dari nara sumber, maka bertolak dari data tabel 8, ternyata nama-identitas mereka itu terkelempokkan menjadi enam (6) kategori. Dari keenam kategori tersebut, kategori yang paling banyak menjadi sasaran komunikasi itu yaitu kategori ‘Lembaga pemerintah setingkat Kementerian s/d

<sup>12</sup> Sifat jelas ini dimaksudkan bahwa nara sumber secara terbuka dan tegas menyebutkan nama-nama (pihak) sasaran pembicaraannya itu dalam pemberitaan surat kabar. Berdasarkan hasil penelitian, sebagaimana disajikan dalam tabel 7, terdapat 410 pihak (nama) yang menjadi sasaran komunikasi itu. Namun diantaranya yang paling menonjol hanya menyangkut beberapa nama saja, yaitu : Mahkamah Konstitusi; Anas Urbaningrum; Ketua Presidium PPI Anas Urbaningrum; KPK; Partai Demokrat; Pemerintah; Pemprov DKI Jakarta; Pertamina; Rubi Rudiandini. (Sumber : diolah kembali berdasarkan data tabel 7).

Kelurahan” dengan proporsi pemunculan dalam pemberitaan sebanyak 116 kali (28.3 %). Kemudian disusul oleh kategori Anggota masyarakat (individu atau mewakili kel. masyarakat) dengan 56 kali pemunculan (13.7 %); Lembaga-lembaga Parpol (parpol angg legislatif/bukan) 30 kali (7.3 %); dan Lembaga Tinggi Negara (Presiden, DPR, MPR, MK, MA, KY) dengan 28 kali pemunculan dalam pemberitaan HL atau sebesar 6.8 %. (Lihat tabel 8).

Kembali ke persoalan distribusi data tabel 5 sebelumnya, itu tentunya dapat diartikan bahwa arus informasi politik melalui pengagendaan media itu, aliran informasinya lebih banyak mengarah ke para pihak pemerintah atau penyelenggara negara. Pihak organisasi media sendiri memerankan aktifitas komunikasi politik tersebut melalui pengagendannya, sebagaimana dikatakan Wright, terkait dengan fungsi yang dimilikinya yaitu fungsi *surveilence*. Dalam konteks sistem politik, temuan ini di sisi lain tentunya mengindikasikan pula bahwa di sini tampaknya pihak media hendak berupaya bahwa melalui pengagendannya itu mereka mencoba memberikan masukan (in put) kepada pihak-pihak yang tergolong dalam komponen suprastruktur politik dalam sistem politik, agar dengan demikian dapat pula lahirnya *out put-out put* dari sistem politik itu sendiri.

**Tabel 5**  
**Sasaran komunikasi Nara Sumber dalam HL**  
**Menurut Komponen dalam Struktur Politik**  
**n 410**

Struktur Politik		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Suprastruktur politik	181	44.1	68.0	68.0
	Infrastruktur politik	85	20.7	32.0	100.0
	Total	266	64.9	100.0	
Missing	System	144	35.1		
Total		410	100.0		

Sumber : Hasil Olah Data : 2014

**Tabel 6**  
**Sasaran komunikasi Nara Sumber dalam HL**  
**Menurut Jelas Tidaknya Pihak yang Jadi Sasaran**  
**n : 410**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Pihak yang jelas	266	64.9	64.9	64.9
	Pihak yang tidak jelas	144	35.1	35.1	100.0
	Total	410	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Olah Data : 2014

**Tabel 7**  
**Sasaran komunikasi Nara Sumber dalam HL**  
**Menurut Identitas Personilnya**  
**n 410**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid		144	35.1	35.1	35.1
	Komisi Pemilihan Umum	1	.2	.2	35.4
	Mahkamah Konstitusi	19	4.6	4.6	40.0
	Abraham Samad	1	.2	.2	40.2
	Adik dari Andi Mallarangeng	1	.2	.2	40.5
	Aktivis PPI Ma'mun Murod dan Tri Dianto	1	.2	.2	40.7
	Anas Urbaningrum	13	3.2	3.2	43.9
	Andi Zulkarnain Mallarangeng	1	.2	.2	44.1
	Badan Cuaca Nasional Amerika Serikat (NWS)	2	.5	.5	44.6
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulut	1	.2	.2	44.9
	Bupati Tanah Karo	2	.5	.5	45.4
	Dirut Bulog Sutarto Alimuso	2	.5	.5	45.9
	Dirut Pertamina Karen Agustiawan	1	.2	.2	46.1
	DPR	1	.2	.2	46.3
	Gubernur DKI Jakarta Jokowi	1	.2	.2	46.6
	Gubernur DKI Jakarta	3	.7	.7	47.3
	Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan	1	.2	.2	47.6
	Istana Presiden	1	.2	.2	47.8
	Jajaran Partai Golkar	1	.2	.2	48.0
	Jajaran Partai PDIP	1	.2	.2	48.3
Jhonny Allen	1	.2	.2	48.5	
Juru Bicara PPI Ma'mun Murod dan Tri Dianto	4	1.0	1.0	49.5	

Keluarga Anas Urbaningrum	1	.2	.2	49.8
Kemendikbud	1	.2	.2	50.0
Kepala BPBD Manado	1	.2	.2	50.2
Ketua Presidium PPI Anas Urbaningrum	8	2.0	2.0	52.2
KH. M. Ahmad Sahal Mahfudz (Alm)	4	1.0	1.0	53.2
KPK	18	4.4	4.4	57.6
Kubu PPI Anas Urbaningrum	2	.5	.5	58.0
Lembaga survei	1	.2	.2	58.3
Mahkamah Konstitusi	2	.5	.5	58.8
Mantan Ketua MK Akil Mochtar	2	.5	.5	59.3
Mantan Ketua MK Mahfud MD	1	.2	.2	59.5
Mantan Menpora Andi Mallarangeng,	1	.2	.2	59.8
Mantan Presiden Mesir Mursi	1	.2	.2	60.0
Mantan Sesmenpora Wafid Muharam	1	.2	.2	60.2
Masyarakat	1	.2	.2	60.5
Menteri BUMN	1	.2	.2	60.7
Menteri Keuangan	1	.2	.2	61.0
Menteri Perdagangan Gita Wirjawan	1	.2	.2	61.2
Menteri Pertanian Suswono	2	.5	.5	61.7
Pakar lingkungan hidup Veronica Kumurur	1	.2	.2	62.0
Para Pengurus Partai PKS	1	.2	.2	62.2
Partai Demokrat	10	2.4	2.4	64.6
Partai Gerindra	2	.5	.5	65.1
Partai Golkar dan PKS	1	.2	.2	65.4
Partai Politik	7	1.7	1.7	67.1
Pemda DKI	1	.2	.2	67.3

Pemda Manado	1	.2	.2	67.6
Pemerintah	72	17.6	17.6	85.1
Pemerintah Daerah	4	1.0	1.0	86.1
Pemkab Karo	1	.2	.2	86.3
Pemkab Karo, Sumut	1	.2	.2	86.6
Pemkab. Bogor	1	.2	.2	86.8
Pemprov DKI Jakarta	7	1.7	1.7	88.5
Pemprov Jawa Barat	1	.2	.2	88.8
Pengungsi	1	.2	.2	89.0
Pengurus Kader Relawan PAN	1	.2	.2	89.3
Penyidik KPK	2	.5	.5	89.8
Pertamina	9	2.2	2.2	92.0
Perusahaan Penjual minuman	1	.2	.2	92.2
Politisi Golkar	3	.7	.7	92.9
Politisi PKS	1	.2	.2	93.2
Presiden RI	1	.2	.2	93.4
Presiden SBY	4	1.0	1.0	94.4
Rubi Rudiandini	5	1.2	1.2	95.6
Sekjen Partai Demokrat Edhy Baskoro	1	.2	.2	95.9
SMAN 2 Denpasar	5	1.2	1.2	97.1
Tentara Nasional Indonesia (TNI)	3	.7	.7	97.8
TNI / Polri	1	.2	.2	98.0
TNI/Polri	1	.2	.2	98.3
Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail	1	.2	.2	98.5
Walikota Jakarta Utara	1	.2	.2	98.8
Walikota Tangerang	1	.2	.2	99.0
Walikota Tangerang Arief Rahardiano Wirmansyah	1	.2	.2	99.3

	Waryono Karyo (mantan Sekjen ESDM)	3	.7	.7	100.0
Total		410	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Olah Data : 2014

**Tabel 8**  
**Sasaran komunikasi Nara Sumber dalam HL**  
**Menurut Status/predikatnya**  
**n 410**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid		144	35.1	35.1	35.1
	Lembaga Tinggi Negara (Presiden, DPR, MPR, MK, MA, KY).	28	6.8	6.8	42.0
	Lembaga Independen Negara (KPU, KPI, Komisi Perempuan, dll..)	21	5.1	5.1	47.1
	Lembaga pemerintah setingkat Kementerian s/d Kelurahan)	116	28.3	28.3	75.4
	UPT-UPT (misal : Bendungan/Pintu Air Katulampa)	15	3.7	3.7	79.0
	Lembaga-lembaga Parpol (parpol angg legislatif/bukan)	30	7.3	7.3	86.3
	Anggota masyarakat (individu atau mewakili kel. masyarakat)	56	13.7	13.7	100.0
	Total	410	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Olah Data : 2014

**Bagian kedua :**

**4) Topik dan Bidang Yang jadi Sarana Pemediaan Struktur Politik**

Berkaitan dengan pemediaan struktur politik tersebut dalam pengagendaaan media, maka berdasarkan hasil penelitian , pengagendaaan mereka itu terekam melalui sejumlah pemberitaan HL dalam edisi terbit Januari 2014. Pemberitaan dimaksud tersaji dalam pemberitaan pada *headline-headline* berbagai judul, dengan mana luas halaman cetaknya cenderung mengambil dua kebiasaan luas cetak yang sama pada dua kelompok surat kabar sampel. Surat kabar Media Indonesia dan Kompas biasanya mencetak agenda media mereka pada halaman cetak seluas 401 – 600 CM/kol, sementara Rakyat Merdeka dan Republika kebiasaan mereka itu umumnya mencetak agenda media mereka pada halaman cetak seluas 601 – 800 CM/kol (lihat tabel 12).

Berbagai judul HL itu sendiri dapat dilihat melalui sajian data tabel 9 berikut. Selanjutnya, dari sejumlah judul HL dimaksud, maka menurut topik isue yang dikandung oleh berbagai *headline* itu, jumlahnya terkategori menjadi 20 topik isue. Dalam pandangan pihak media, urutan tingkat kepentingan topik isue tadi yaitu : pertama menyangkut topik isue Bencana alam (42 =10.2 %); kedua, Kasus proyek Hambalang (18 =4.4 %); ketiga Kenaikan harga elpiji (11 =2.7 %); dan keempat terkaitisu Pemilu (8= 2.0 %). Menyangkut urutan tingkat kepentingan ini, selengkapnya dapat dilihat dalam tabel 10.

Kemudian jika topik isue tadi ditelaah lebih jauh, semisal dari segi pembidangan masalah isue, maka temuan penelitian memperlihatkan bahwa topik-topik isue itu mengelompok menjadi bidang enam (6) bidang masalah, dengan bidang masalah Hukum yang paling banyak diagendakan pihak media dengan proporsi sebanyak 25 kali pemediaman atau ( 6.1 %). Disusul oleh bidang ekonomi dan politik yang masing proporsinya sebanyak 16 (3.9 % ) dan 15 (3.7 %). (lihat tabel 11).

**Tabel 9**  
**Judul Headline Surat kabar Menurut Nama Surat kabar**

			Nama Surat Kabar				Total
			Media Indonesia	Kompas	Rakyat Merdeka	Republika	
Judul headline	16 Orang Tewas di Manado	Count	0	1	0	0	1
		% within Judul headline	.0%	100.0%	.0%	.0%	100.0%
	3.000 Lubang di Pantura	Count	0	1	0	0	1
		% within Judul headline	.0%	100.0%	.0%	.0%	100.0%
	Aku Kudu Piye Mas...?	Count	0	0	1	0	1
		% within Judul headline	.0%	.0%	100.0%	.0%	100.0%
	Anas Contoh Buruk	Count	1	0	0	0	1
		% within Judul headline	100.0%	.0%	.0%	.0%	100.0%
	Anas Didorong Jadi Peniup Hambalang	Count	0	0	1	0	1
		% within Judul headline	.0%	.0%	100.0%	.0%	100.0%
	Anas Dijerat Tiga Kasus	Count	0	1	0	0	1
		% within Judul headline	.0%	100.0%	.0%	.0%	100.0%
	Anas Jadi Pembelajaran	Count	0	0	0	1	1
		% within Judul headline	.0%	.0%	.0%	100.0%	100.0%
	Anas Melawan Setengah Hati	Count	0	0	1	0	1
		% within Judul headline	.0%	.0%	100.0%	.0%	100.0%
	Anas Ngelawan Akhirnya "Deal"	Count	0	0	1	0	1
		% within Judul headline	.0%	.0%	100.0%	.0%	100.0%
	Anas Siap Beberkan Peran Ibas	Count	1	0	0	0	1
		% within Judul headline	100.0%	.0%	.0%	.0%	100.0%

Anas: Terima Kasih, SBY	Count	0	0	0	1	1
	% within Judul headline	.0%	.0%	.0%	100.0%	100.0%
Anggaran Banjir Minim	Count	1	0	0	0	1
	% within Judul headline	100.0%	.0%	.0%	.0%	100.0%
Antisipasi Bencana Susulan	Count	0	0	0	1	1
	% within Judul headline	.0%	.0%	.0%	100.0%	100.0%
Bahan Berbahaya Mudah Didapat	Count	0	1	0	0	1
	% within Judul headline	.0%	100.0%	.0%	.0%	100.0%
Bangsa Kehilangan Kiai Teladan	Count	0	0	0	1	1
	% within Judul headline	.0%	.0%	.0%	100.0%	100.0%
Banjir di Jakarta Berpotensi Meningkat	Count	0	1	0	0	1
	% within Judul headline	.0%	100.0%	.0%	.0%	100.0%
Banjir Manado Tersebab Masifnya Konversi	Count	1	0	0	0	1
	% within Judul headline	100.0%	.0%	.0%	.0%	100.0%
Banjir Nyaris Tenggelamkan Kota Manado	Count	0	1	0	0	1
	% within Judul headline	.0%	100.0%	.0%	.0%	100.0%
BPK Telusuri Beras Vietnam	Count	0	0	0	1	1
	% within Judul headline	.0%	.0%	.0%	100.0%	100.0%
Choel Siap Gantikan Andi Masuk Penjara	Count	0	0	1	0	1
	% within Judul headline	.0%	.0%	100.0%	.0%	100.0%
Dahlan Ditanya Cara Mengalahkan Jokowi	Count	0	0	1	0	1
	% within Judul headline	.0%	.0%	100.0%	.0%	100.0%
Dahlan Iskan Pasang Badan	Count	0	0	1	0	1
	% within Judul headline	.0%	.0%	100.0%	.0%	100.0%
Dana Saksi Parpol di TPS Ditunda	Count	0	1	0	0	1
	% within Judul headline	.0%	100.0%	.0%	.0%	100.0%
Denny Mundur Dari Wakil Menkumham	Count	0	0	1	0	1
	% within Judul headline	.0%	.0%	100.0%	.0%	100.0%
Denny Tak Mau Terima Maaf Yang Mengancam	Count	0	0	1	0	1
	% within Judul headline	.0%	.0%	100.0%	.0%	100.0%
Dirut Pertamina Lawan Ancaman	Count	0	0	0	1	1
	% within Judul headline	.0%	.0%	.0%	100.0%	100.0%
Distribusi Pangan Tersendat	Count	0	0	0	1	1
	% within Judul headline	.0%	.0%	.0%	100.0%	100.0%
Gerindra Genit	Count	0	0	1	0	1
	% within Judul headline	.0%	.0%	100.0%	.0%	100.0%

Golkar-PKS Jajaki Koalisi	Count	0	0	1	0	1
	% within Judul headline	.0%	.0%	100.0%	.0%	100.0%
Harga Elpiji Dikompromikan	Count	0	0	0	1	1
	% within Judul headline	.0%	.0%	.0%	100.0%	100.0%
Ibas: Demokrat Tolak Kenaikan Harga Elpi	Count	0	0	1	0	1
	% within Judul headline	.0%	.0%	100.0%	.0%	100.0%
Ibu Kota Kian Melelahkan	Count	1	0	0	0	1
	% within Judul headline	100.0%	.0%	.0%	.0%	100.0%
Indonesia Darurat Bencana	Count	0	1	0	0	1
	% within Judul headline	.0%	100.0%	.0%	.0%	100.0%
Jakarta Kian Mencemaskan	Count	0	1	0	0	1
	% within Judul headline	.0%	100.0%	.0%	.0%	100.0%
Jangan Takut Pakai Anggaran Bencana	Count	1	0	0	0	1
	% within Judul headline	100.0%	.0%	.0%	.0%	100.0%
Jokowi Menatap, Banjir Tutup Atap	Count	0	0	1	0	1
	% within Judul headline	.0%	.0%	100.0%	.0%	100.0%
Kalau Kebanjiran, Istana Sudah Ikhlas	Count	0	0	1	0	1
	% within Judul headline	.0%	.0%	100.0%	.0%	100.0%
Karen Sebut Peran Jhonny Allen	Count	0	0	0	1	1
	% within Judul headline	.0%	.0%	.0%	100.0%	100.0%
Kasus Dua Kementerian Menanti Anas Urbaningrum	Count	1	0	0	0	1
	% within Judul headline	100.0%	.0%	.0%	.0%	100.0%
Keluarga Khawatirkan Anas	Count	0	0	0	1	1
	% within Judul headline	.0%	.0%	.0%	100.0%	100.0%
Kenaikan Elpiji Ditinjau Ulang	Count	0	0	0	1	1
	% within Judul headline	.0%	.0%	.0%	100.0%	100.0%
Kerusakan Ekologis Lepas kendali	Count	1	0	0	0	1
	% within Judul headline	100.0%	.0%	.0%	.0%	100.0%
Korban Masih Tertimbun	Count	0	0	0	1	1
	% within Judul headline	.0%	.0%	.0%	100.0%	100.0%
KPK Siap Jemput Paksa Anas	Count	1	0	0	0	1
	% within Judul headline	100.0%	.0%	.0%	.0%	100.0%
KPK Tantang Anas Beberkan Pihak Lain	Count	0	1	0	0	1
	% within Judul headline	.0%	100.0%	.0%	.0%	100.0%
Kubu Anas Tidak Nyerah Begitu Saja	Count	0	0	1	0	1
	% within Judul headline	.0%	.0%	100.0%	.0%	100.0%

Lalu Lintas Lumpuh	Count	0	0	0	1	1
	% within Judul headline	.0%	.0%	.0%	100.0%	100.0%
Larangan Jilbab Langgar HAM	Count	0	0	0	1	1
	% within Judul headline	.0%	.0%	.0%	100.0%	100.0%
Maksimalkan Pengawasan Elpiji	Count	1	0	0	0	1
	% within Judul headline	100.0%	.0%	.0%	.0%	100.0%
MK Tak Ubah Pemilu 2014	Count	0	0	0	1	1
	% within Judul headline	.0%	.0%	.0%	100.0%	100.0%
Musim Dingin Buruk Ancam AS	Count	0	1	0	0	1
	% within Judul headline	.0%	100.0%	.0%	.0%	100.0%
Nasib Ibas Tergantung Anas	Count	1	0	0	0	1
	% within Judul headline	100.0%	.0%	.0%	.0%	100.0%
Pak SBY Mau Gak Kemah Di Sinabung	Count	0	0	1	0	1
	% within Judul headline	.0%	.0%	100.0%	.0%	100.0%
Pantura Jawa Barat Terkunci	Count	0	1	0	0	1
	% within Judul headline	.0%	100.0%	.0%	.0%	100.0%
Para Pejabat Cari Biang Keroknya	Count	0	0	1	0	1
	% within Judul headline	.0%	.0%	100.0%	.0%	100.0%
Partai Demokrat Perlu Lebih Kerja Keras	Count	0	1	0	0	1
	% within Judul headline	.0%	100.0%	.0%	.0%	100.0%
Partai Evaluasi Strategi	Count	0	1	0	0	1
	% within Judul headline	.0%	100.0%	.0%	.0%	100.0%
Pasokan Pangan Menipis	Count	0	0	0	1	1
	% within Judul headline	.0%	.0%	.0%	100.0%	100.0%
Pasokan Pangan Terganggu	Count	0	1	0	0	1
	% within Judul headline	.0%	100.0%	.0%	.0%	100.0%
Pejabat Tinggi Korupsi Langsung Dihukum	Count	0	0	1	0	1
	% within Judul headline	.0%	.0%	100.0%	.0%	100.0%
Pemerintah Belum Fokus	Count	0	0	0	1	1
	% within Judul headline	.0%	.0%	.0%	100.0%	100.0%
Pemerintah Gagap Menghadapi Bencana	Count	0	1	0	0	1
	% within Judul headline	.0%	100.0%	.0%	.0%	100.0%
Pemerintah Permainkan Rakyat	Count	1	0	0	0	1
	% within Judul headline	100.0%	.0%	.0%	.0%	100.0%
Pemilu Kurang Diminati	Count	0	0	0	1	1
	% within Judul headline	.0%	.0%	.0%	100.0%	100.0%

Pemilu Serentak 2019 Putusan Bijak	Count	1	0	0	0	1
	% within Judul headline	100.0%	.0%	.0%	.0%	100.0%
Pemulihan Ekonomi Pascabencana Buruk	Count	1	0	0	0	1
	% within Judul headline	100.0%	.0%	.0%	.0%	100.0%
Penanganan Mengecewakan	Count	0	1	0	0	1
	% within Judul headline	.0%	100.0%	.0%	.0%	100.0%
Pencarian Korban Jadi Fokus	Count	0	0	0	1	1
	% within Judul headline	.0%	.0%	.0%	100.0%	100.0%
Penguasa Mesir Kian Represif	Count	0	0	0	1	1
	% within Judul headline	.0%	.0%	.0%	100.0%	100.0%
Pengungsi Sinabung Semakin Membengkak	Count	1	0	0	0	1
	% within Judul headline	100.0%	.0%	.0%	.0%	100.0%
Penjual Gas Mainkan Harga	Count	0	0	0	1	1
	% within Judul headline	.0%	.0%	.0%	100.0%	100.0%
Percepat Normalisasi Kali	Count	0	0	0	1	1
	% within Judul headline	.0%	.0%	.0%	100.0%	100.0%
Persaingan Ketat Pileg Jadi Penentu	Count	0	1	0	0	1
	% within Judul headline	.0%	100.0%	.0%	.0%	100.0%
Pertamina Pernah diajak Urunan THR Untuk	Count	0	0	1	0	1
	% within Judul headline	.0%	.0%	100.0%	.0%	100.0%
Pertamina Revisi Harga Elpiji	Count	1	0	0	0	1
	% within Judul headline	100.0%	.0%	.0%	.0%	100.0%
Pertamina Rugi Rp. 6,5 Triliun	Count	0	1	0	0	1
	% within Judul headline	.0%	100.0%	.0%	.0%	100.0%
Petaka 2006 Seakan Terulang	Count	1	0	0	0	1
	% within Judul headline	100.0%	.0%	.0%	.0%	100.0%
Potensi Gagal Panen Meluas	Count	0	0	0	1	1
	% within Judul headline	.0%	.0%	.0%	100.0%	100.0%
Presiden Didesak Kerahkan Tentara	Count	0	1	0	0	1
	% within Judul headline	.0%	100.0%	.0%	.0%	100.0%
Pusat Harus Ambil Alih	Count	1	0	0	0	1
	% within Judul headline	100.0%	.0%	.0%	.0%	100.0%
Rakyat Miskin Bertambah	Count	1	0	0	0	1
	% within Judul headline	100.0%	.0%	.0%	.0%	100.0%
Ratusan Rumah Rusak. Gempa 6,5 Skala Richter	Count	0	1	0	0	1
	% within Judul headline	.0%	100.0%	.0%	.0%	100.0%

Realisasikan Asuransi Bencana	Count	1	0	0	0	1
	% within Judul headline	100.0%	.0%	.0%	.0%	100.0%
Realisasikan Konsep Megapolitan	Count	1	0	0	0	1
	% within Judul headline	100.0%	.0%	.0%	.0%	100.0%
Ribuan Hektar Sawah Rusak	Count	0	1	0	0	1
	% within Judul headline	.0%	100.0%	.0%	.0%	100.0%
Saatnya Kolaborasi Atasi Bencana	Count	1	0	0	0	1
	% within Judul headline	100.0%	.0%	.0%	.0%	100.0%
Saya dan Pak Mahfud Menjemput Takdir	Count	0	0	1	0	1
	% within Judul headline	.0%	.0%	100.0%	.0%	100.0%
Seperempat Daerah Tanpa Badan Bencana	Count	1	0	0	0	1
	% within Judul headline	100.0%	.0%	.0%	.0%	100.0%
SMS Akil Soal 3 Ton "Emas"	Count	0	0	1	0	1
	% within Judul headline	.0%	.0%	100.0%	.0%	100.0%
Sutan Bhatogana Ngeri-Ngeri Sedap	Count	0	0	1	0	1
	% within Judul headline	.0%	.0%	100.0%	.0%	100.0%
Syarat Capres 2019 Mesti Tetap Ketat	Count	1	0	0	0	1
	% within Judul headline	100.0%	.0%	.0%	.0%	100.0%
Tinjau Kenaikan Harga Elpiji	Count	0	1	0	0	1
	% within Judul headline	.0%	100.0%	.0%	.0%	100.0%
Tinjau Ulang Harga Gas	Count	0	0	0	1	1
	% within Judul headline	.0%	.0%	.0%	100.0%	100.0%
Tsunami Kecil di Manado	Count	1	0	0	0	1
	% within Judul headline	100.0%	.0%	.0%	.0%	100.0%
Tunda Sodetan Cisadane, Jokowi Tentu Tak	Count	0	0	1	0	1
	% within Judul headline	.0%	.0%	100.0%	.0%	100.0%
Uang Bercap Prabowo Marak di Dunia Maya	Count	0	0	1	0	1
	% within Judul headline	.0%	.0%	100.0%	.0%	100.0%
Upaya Belum Optimal	Count	0	1	0	0	1
	% within Judul headline	.0%	100.0%	.0%	.0%	100.0%
Waspada Bencana Belum Berlalu	Count	0	1	0	0	1
	% within Judul headline	.0%	100.0%	.0%	.0%	100.0%
Waspada Gempa Susulan	Count	0	0	0	1	1
	% within Judul headline	.0%	.0%	.0%	100.0%	100.0%
Yusril: Hasil Pemilu 2014 Inkonstitusion	Count	0	0	1	0	1
	% within Judul headline	.0%	.0%	100.0%	.0%	100.0%
Total	Count	25	25	25	25	100
	% within Judul headline	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	100.0%

Sumber : Hasil Olah Data 2014

**Tabel 10**  
**Pengagendaaan Media Struktur Politik Menurut Topik Isue**

Topik Isue		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid				75.6	75.6
	Kenaikan harga elpiji	11	2.7	2.7	78.3
	Minuman keras	1	.2	.2	78.5
	Kasus suap SKK Migas	4	1.0	1.0	79.5
	Kasus suap terhadap Ketua MA	1	.2	.2	79.8
	Meninggalnya Ketua Umum MUI	1	.2	.2	80.0
	Kenaikan harga sembako	1	.2	.2	80.2
	Koalisi parpol	1	.2	.2	80.5
	Wacana hukuman mati bagi koruptor	1	.2	.2	80.7
	Pergolakan politik di Mesir	1	.2	.2	81.0
	Pemulihan ekonomi pasca bencana alam	1	.2	.2	81.2
	Wacana pemberian asuransi bagi korban bencana alam	1	.2	.2	81.5
	Wacana pemberian dana saksi parpol di TPS	1	.2	.2	81.7
	Beredarnya uang bercap Prabowo di dunia maya	1	.2	.2	82.0
	Impor beras ilegal	2	.5	.5	82.4
	Konvensi Capres	2	.5	.5	82.9
	Kasus proyek Hambalang	18	4.4	4.4	87.3
	Kinerja parpol	1	.2	.2	87.6
	Larangan berjilbab	1	.2	.2	87.8
	Pemilu	8	2.0	2.0	89.8
Bencana alam	42	10.2	10.2	100.0	
Total	100	24.4			
Missing	System	310	75.6		
Total		410	100.0		

Sumber : Hasil Olah Data 2014.

**Tabel 11**  
**Pengagendaan Media Struktur Politik Menurut Bidang Masalah Isue**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Politik	15	3.7	15.0	15.0
	Ekonomi	16	3.9	16.0	31.0
	Sosial	9	2.2	9.0	40.0
	Hukum	25	6.1	25.0	65.0
	Militer	1	.2	1.0	66.0
	Lain-lain (hiburan, kriminal, lingkungan hidup, dst)	34	8.3	34.0	100.0
	Total	100	24.4	100.0	
Missing	System	310	75.6		
Total		410	100.0		

Sumber : Hasil Olah Data 2014.

**Tabel 12**  
**Luas Cm kolom**

Luas Cm kolom	Media Indonesia		Kompas		Rakyat Merdeka		Republika		Total	
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%
201 - 400	4	30.8%	2	15.4%	3	23.1%	4	30.8%	13	100.0%
401 - 600	9	36.0%	8	32.0%	8	32.0%			25	100.0%
601 - 800	6	16.2%	4	10.8%	12	32.4%	15	40.5%	37	100.0%
801 - 1.000	5	27.8%	5	27.8%	2	11.1%	6	33.3%	18	100.0%
1.001 - 1.200	1	16.7%	5	83.3%					6	100.0%
1.401 - 1.600			1	100.0%					1	100.0%

Sumber : Hasil Olah Data 2014

### Diskusi

Pada dasarnya, penelitian ini sebenarnya hanya berupaya mengetahui bagaimana komponen-komponen dalam struktur politik pada sistem politik Indonesia, diaktivasi untuk menyampaikan opini, sikap dan aspirasinya oleh media surat kabar melalui proses *agenda setting* mereka. Dalam konteks ini, penelitian ini fokus pada masalah-masalah sbb.; Bagian pertama : 1) Terkait dengan struktur politik, komponen apa sajakah yang dimediasi oleh organisasi media surat kabar itu ? ; 2) Komponen-komponen apakah dalam struktur politik yang paling banyak lolos dalam seleksi proses *agenda setting* itu ? ; 3) Komponen apakah dalam struktur politik yang menjadi sasaran komunikasi dalam HL yang lolos dalam seleksi proses *agenda setting* itu ? ; Bagian kedua : 4) Terkait pemediaan struktur politik, pada Isue dalam bidang apa sajakah yang paling banyak lolos

dalam proses *agenda setting* itu ? ; 5) Dalam Isue pada topik apa sajakah komponen-komponen struktur politik itu dimediasi oleh pihak organisasi media surat kabar ?

Berangkat dari sejumlah masalah di atas, maka terkait dengan permasalahan “1”, penelitian ini menemukan bahwa : dalam pemediannya, organisasi media surat kabar itu cenderung memediasikan kedua komponen struktur politik dalam pengagendaan medianya. Namun, pihak-pihak dalam komponen suprastruktur politik, lebih banyak mendapat pemediasian ketimbang pihak-pihak dalam komponen infrastruktur politik. Secara terminologis terkait dengan fungsi komunikasi politik<sup>13</sup>, dengan temuan ini antara lain tentunya dapat dimaknai bahwa pertama di sini pihak surat kabar (media) dalam posisinya yang juga sebagai bagian dari pihak dalam komponen infrastruktur politik, secara empirik telah membuktikan dirinya sebagai pihak yang berperan besar bagi “hidup”- nya keberlangsungan proses komunikasi politik dalam sistem politik Indonesia saat ini. Berdasarkan fakta empirik tersebut, di sini media tampaknya mendukung asumsi yang pernah dikemukakan Alfian beberapa waktu lalu, bahwa komunikasi politik itu ibarat darah yang mengalir fungsi-fungsi lainnya dalam sistem politik guna mencapai tujuan sistem politik itu sendiri. Melalui fakta empirik itu pula, maka secara lebih detil, itu berarti pula bahwa pihak surat kabar itu telah mendaya gunakan komunikasi politik untuk menghubungkan pikiran politik yang hidup dalam masyarakat, baik pikiran intra golongan, institut, asosiasi, ataupun sektor kehidupan politik masyarakat dengan sektor pemerintahan. (Kantaprawira, 1988 : 60).

Makna kedua dari temuan tadi, yaitu berkaitan dengan soal menonjolnya aktor-aktor politik dalam komponen suprastruktur politik tadi dalam pengagendaan media. Dalam hubungannya dengan proses komunikasi politik dalam sistem politik, maka gejala itu bisa dimaknai bahwa pihak media itu tampak cenderung lebih mengutamakan arus komunikasi politik yang sifatnya *top down* dari pada yang bersifat *bottom up*. Dengan kata lain, informasi politik yang mengalir itu tampaknya lebih banyak yang sifatnya memerankan fungsi *out put* dalam sistem politik yang berupa kebijakan dari para penyelenggara negara (pemerintah). Dengan demikian, fungsi in put sistem politik yang nota bene disederhanakan Almond & Coleman (Kantaprawira, 1988 : 61) itu menjadi *political socialization and recruitment; interest articulation; interest agregation; dan political communication*, tampak jadi kurang ditunaikan oleh pihak organisasi media surat kabar melalui fungsi *agenda setting*-nya.

Selanjutnya, terkait dengan temuan menyangkut permasalahan kedua, yakni tentang komponen-komponen dalam struktur politik yang paling banyak lolos dalam seleksi proses *agenda setting*, maka temuan menunjukkan bahwa dalam kategori suprastruktur politik itu tadi ternyata jumlahnya mencapai 239 aktor politik. Pemediannya dilakukan organisasi media antara 1-8 kali dalam edisi Januari. Diantara frekuensi penyajian tersebut, maka para nara sumber itu lebih banyak disajikan media dengan satu (1) kali penyajian. Ada juga nara sumber lainnya yang mendapat pemediasian lebih dari satu kali, yaitu seperti : Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB); Jubir KPK; Ketua KPK; dan lain-lain yang kesemuanya itu memang menunjukkan pihak aparat pemerintah. Sementara komponen/pihak yang mendapat pemediasian di atas dua kali dan bahkan mencapai delapan (8) kali, jumlahnya tidak banyak. Dapat disebutkan, mereka ini terdiri dari : Menko Perekonomian (3); Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB (3); Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG (3); Wakil Presiden RI (3); Pakar Hukum Tata Negara Unhas Makassar(3); Menko Kesra (3); Dirut PT Pertamina (3); Vice President Corporate Pertamina (3);-Menteri-Koordinator-Perekonomian (4); Wakil Ketua KPK (5); Hakim Konstitusi MK (5); Gubernur DKI Jakarta (6); Wakil Menteri Hukum dan HAM (6); Menteri BUMN (7); Juru Bicara KPK (8); Presiden RI (8).

Temuan yang demikian itu tentunya membuktikan kalau pihak media itu memang lebih mengutamakan pihak pemerintah dalam pengagendaannya itu. Pendominasian pihak suprastruktur politik yang demikian dalam konteks sistem politik tentunya jadi kurang ideal karena dapat

---

<sup>13</sup> fungsi yang menurut Almond selalu ada dalam setiap sistem politik.

menciptakan ketidakseimbangan arus informasi politik dalam sistem politik. Suatu keadaan yang tentunya relatif mirip dengan masa-masa era sistem pemerintahan Orde Baru dahulu, di mana saat itu karena pihak media yang memang kerap dikooptasi pemerintah karena berupaya menciptakan iklim komunikasi yang kondusif melalui penerapan prinsip “monosemi” dalam berbahasa, jadi lebih sering mengutamakan sumber-sumber pemerintah ketimbang sumber non pemerintah. Keadaan ini tentunya kurang ideal saat ini bagi praktik dunia jurnalistik mengingat saat ini prinsip ‘polysemi’ dalam berkomunikasi melalui pers, lebih dimungkinkan eksis seiring iklim pers Indonesia yang kini menjadi bebas karena berbasiskan pada komitmen pemerintahan era reformasi, yakni proses demokratisasi yang seluas-luasnya termasuk di bidang pers nasional. Kemunculan fenomena ini sendiri dalam konteks perspektif Teori Komunikasi Timur, patut dicurigai sehubungan dalam proses pemediaan pesan itu sendiri pihak media disebutkan tidak terlepas dari sejumlah kepentingan. Dalam kaitan ini misalnya dalam kaitan Marx, maka media massa seperti surat kabar, dalam masyarakat kapitalis yang dinilai sebagai alat produksi itu<sup>14</sup>, yang oleh Marx dianggap kepemilikannya hanya dikuasai oleh beberapa gelintir orang saja (kaum borjuis), melalui dominasi mereka dalam pewacanaan (*agenda setting*), akan mendeterminasi kesadaran masyarakat yang disebut sebagai kesadaran palsu (*false consciousness*).<sup>15</sup> Dalam konstelasi yang demikian, tentu saja dimaksudkan agar masyarakat pengonsumsi media melalui format pengagendaaan media tadi terasuki oleh kepentingan dan ideologi penguasa media.

Berkaitan dengan persoalan ketiga, yakni menyangkut komponen dalam struktur politik yang menjadi sasaran komunikasi nara sumber dalam pengagendaaan media melalui HL, maka temuan menunjukkan bahwa “Sasaran komunikasi Nara Sumber dalam HL Menurut Komponen dalam Struktur Politik”, memperlihatkan bahwa sasaran komunikasi itu ternyata lebih banyak berasal dari komponen suprastruktur politik. Komponen infrastruktur politik sendiri mendapat porsi penempatan yang relatif kecil. Dengan temuan ini kiranya menyiratkan bahwa melalui proses *agenda setting*nya pihak media/surat kabar di sini mencoba mempraktekkan bentuk proses komunikasi politik yang terbuka sifatnya. Keterbukaan dimaksud yaitu berupa proses komunikasi antar sesama pihak pemerintah yang dimediasi melalui surat kabar. Dengan kata lain, ini menjadi bukti bahwa surat kabar pada saat ini sudah menciptakan proses komunikasi politik pada sesama unsur dalam komponen suprastruktur politik dalam sistem politik Indonesia. Suatu fenomena yang tentunya sulit dijumpai dalam praktek komunikasi politik pada era Orde Baru. Pada saat itu, proses komunikasi politik yang lazim terjadi biasa yaitu proses komunikasi politik yang bersifat top down, dari komponen supra ke komponen infra struktur politik. Dengan demikian, ini bisa pula menjadi jawaban kenapa dalam analisis sebelumnya itu, pihak media lebih dominan dalam menganalisis pihak aktor politik dari komponen suprastruktur politik ketimbang dari komponen infrastruktur politik. Berdasarkan hasil analisis barusan, maka ini dapat diasumsikan bahwa perilaku media dalam pengagendaaan itu ternyata berkaitan dengan *interest* penciptaan proses komunikasi politik di antara sesama unsur dalam komponen suprastruktur politik. Penciptaan pola komunikasi politik yang demikian antara lain tentu bisa bertendensi menciptakan saling koreksi di antara sesama aparatur pemerintah.

Terakhir, yaitu berkaitan dengan temuan penelitian menyangkut topik isu HL yang jadi sarana pemediaan struktur politik. Dalam pandangan pihak media sendiri, mengacu pada hasil penelitian, urutan tingkat kepentingan topik isu dalam HL tadi yaitu : pertama menyangkut topik isu Bencana alam ; kedua, Kasus proyek Hambalang; ketiga Kenaikan harga elpiji; dan keempat terkait isu Pemilu. Melihat urutan tingkat kepentingan tersebut, maka jika dihubungkan dengan fenomen menonjolnya pemediaan aktor politik yang berasal dari kalangan suprastruktur politik sebelumnya, kiranya itu menjadi wajar mengingat urutan kepentingan isu dimaksud, semuanya itu menyiratkan isu yang memang menyangkut urusan yang nota bene banyak melibatkan pemerintah. Dengan demikian, hasil analisis sebelumnya menyangkut *interest* media terkait penciptaan proses komunikasi politik di antara sesama unsur dalam komponen suprastruktur politik, kiranya itu menjadi relevan dalam hubungannya dengan soal urutan tingkat kepentingan topik isu dalam HL dimaksud. Penciptaan proses komunikasi politik di antara sesama unsur dalam komponen

<sup>14</sup> Dalam kaitan ini, Marx Sering menginterpretasikan bahwa penguasaan terhadap teknologi berarti menguasai ekonomi dan karena itu bisa mendeterminasi kesadaran masyarakat. (Daniel Chandler, <http://www.aber.ac.uk>, 1994).

<sup>15</sup> Marxisme klasik menggambarkan ideologi sebagai kesadaran palsu (*false consciousness*) yang diabadikan oleh kekuatan-kekuatan dominan dalam masyarakat (Littlejohn, 1996 :228).

suprastruktur politik pada isu-isu terkait kepentingan publik, oleh media tentunya diharapkan agar masyarakat pembaca dapat memperoleh atau mengetahui dinamika informasi menyangkut isu yang mereka agendakan. (Hai)

## PENUTUP

### Kesimpulan dan Saran

Pada hakikatnya penelitian ini berupaya mempelajari fenomena proses komunikasi politik yang terjadi lewat mediasi organisasi surat kabar melalui proses agenda setting mereka. Dalam konteks ini, penelitian ini memfokuskan permasalahannya pada sejumlah rumusan masalah sbb. : 1) Terkait dengan **struktur politik**, komponen apa sajakah yang dimediasi oleh **organisasi media surat kabar** itu ? 2) Komponen-komponen apakah dalam struktur politik yang paling banyak lolos dalam seleksi proses *agenda setting* itu ? 3) Komponen apakah dalam struktur politik yang menjadi sasaran komunikasi narasumber dalam HL yang lolos dalam seleksi proses *agenda setting* itu ? 4) Terkait pemediaan struktur politik, pada Isue dalam bidang apa sajakah yang paling banyak lolos dalam proses *agenda setting* itu ? 5) Dalam Isue pada topik apa sajakah komponen-komponen struktur politik itu dimediasi oleh pihak organisasi media surat kabar ?

Berdasarkan analisis dan diskusi terhadap temuan penelitian maka dapat dikemukakan beberapa hal sbb. : 1) Bahwa pihak surat kabar (organisasi media) dalam posisinya yang juga sebagai bagian dari pihak dalam komponen infrastruktur politik, secara empirik ia telah membuktikan dirinya sebagai pihak yang berperan besar bagi “hidup”- nya keberlangsungan proses komunikasi politik dalam sistem politik Indonesia saat ini; 2) Pihak surat kabar itu juga tampak telah mendayagunakan komunikasi politik itu guna menghubungkan pikiran politik yang hidup dalam masyarakat, baik pikiran intra golongan, institut, asosiasi, ataupun sektor kehidupan politik masyarakat dengan sektor pemerintahan. ; 3) Berkaitan dengan fenomena menonjolnya aktor-aktor politik dalam komponen suprastruktur politik dalam pengagendaaan media, maka dalam hubungannya dengan proses komunikasi politik dalam sistem politik, gejala itu bisa dimaknai bahwa pihak media itu tampak cenderung lebih mengutamakan arus komunikasi politik yang sifatnya *top down* dari pada yang bersifat *bottom up*.; 4) Pihak media itu memang tampak cenderung lebih mengutamakan pihak pemerintah dalam pengagendaannya itu. Pendominasian pihak suprastruktur politik yang demikian dalam konteks sistem politik tentunya jadi kurang ideal karena dapat menciptakan ketidakseimbangan arus informasi politik dalam sistem politik; 5) Bahwa melalui proses *agenda setting*nya pihak media/surat kabar di sini mencoba mempraktekkan bentuk proses komunikasi politik yang terbuka sifatnya, ini menjadi bukti bahwa surat kabar pada saat ini sudah menciptakan proses komunikasi politik pada sesama unsur dalam komponen suprastruktur politik dalam sistem politik Indonesia. “*Interest*” media terkait penciptaan proses komunikasi politik di antara sesama unsur dalam komponen suprastruktur politik tersebut, kemunculan fenomenanya berindikasi saling berkaitan dengan persoalan urutan tingkat kepentingan isu dalam proses pengagendaaan media.

Berkaitan dengan kesimpulan menyangkut “*Interest*” media berupa penciptaan proses komunikasi politik yang *terbuka* di antara sesama unsur dalam komponen suprastruktur politik, maka bagi para aktor politik yang nota bene dari kalangan aparat pemerintah itu, hendaknya ini menjadi masukan penting terutama dalam kaitan kepentingan mengekspresikan opini dan attitude menyangkut suatu persoalan yang menjadi perhatian media agar informasi yang beredar kemudian melalui pengagendaaan media itu tidak menciptakan ambiguitas, citra negatif, *misunderstanding* atau *incredibility* di kalangan khalayak media surat kabar.

### Daftar Pustaka :

- Almond, Gabriel, *The Politics of the Development Areas*, 1960.  
Assegaff, Dja'far H., 1983. **Jurnalistik Masa Kini-Pengantar ke Praktek Kewartawanan**, Jakarta, Ghalia Indonesia.  
Koeswinarno & Budiyo, 1991, “Penulisan Teras Berita dalam Jurnalistik Masa Kini”, dalam **Jurnal Penelitian dan Komunikasi Pembangunan**, Jakarta, Badan Litbang Penerangan , Departemen Penerangan.  
McCombs, M.E., & Shaw, D.L. The Agenda-Setting Function of Mass Media. *Public Opinion Quarterly*, 36 (Summer), 176-187), 1972.

- Mc Quail dan Windahl, Model-Model Komunikasi , terjemahan Putu Laxman Pendit, Jakarta, Uni Primas, 1986.
- Effendy, Onong Uchyana, 2000, **Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi**, Bandung, Citra Aditya Bakti, PT.
- Werner J. Severin, James W. Tankard, Jr. Communication Theories: Origins, Methods and Uses in the Mass Media, 1997, 4<sup>th</sup> ed in Chinese, translated by Guo Zhenzhi, 2000, Huaxia Publishing House, P.345.
- Robert A. Dahl, 1977. Modern Political Analysis, Prentice Hall of Indoa, New Delhi, : 3).
- Rusadi, Udi, 1998 , “Perspektif Studi Media Massa”, *Jurnal Kampus Tercinta Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Jakarta, Yayasan Kampus Tercinta, hal. 8.
- Rusadi, Udi, “Efek Agenda Setting Media Massa, Telaahan Teoritis”, dalam **Jurnal Penelitian dan Komunikasi Pembangunan**, No. 36, Jakarta, Badan Litbang Penerangan, Departemen Penerangan R.I., 1996.
- [http://www.Unc.Edu/courses/2000fall/jo.mc.245-001/agenda\\_setting.html](http://www.Unc.Edu/courses/2000fall/jo.mc.245-001/agenda_setting.html)
- [http://www.Unc.Edu/courses/2000fall/jo.mc.245-001/agenda\\_setting.html](http://www.Unc.Edu/courses/2000fall/jo.mc.245-001/agenda_setting.html)

## NEGOSIASI

Christopher W. Moore, Ph.D. Christopher W. Moore, Ph.D.

(Sumber : <http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/army/usace/negotiation.htm>, diakses Mei 2012)

Negosiasi adalah salah satu pendekatan yang paling umum digunakan untuk membuat keputusan dan mengelola sengketa. Itu juga merupakan blok bangunan utama bagi banyak prosedur alternatif penyelesaian sengketa lainnya.

Negosiasi terjadi antara suami-isteri, orang tua dan anak-anak, manajer dan staf, pengusaha dan karyawan, profesional dan klien, dalam dan antara organisasi dan antara lembaga dan publik. Negosiasi adalah suatu proses pemecahan masalah di mana dua orang atau lebih secara sukarela mendiskusikan perbedaan mereka dan berusaha untuk mencapai keputusan bersama pada keprihatinan bersama mereka. Negosiasi mengharuskan peserta untuk mengidentifikasi isu-isu tentang apa yang mereka berbeda, mendidik satu sama lain tentang kebutuhan dan kepentingan mereka, menghasilkan pilihan-pilihan penyelesaian yang mungkin dan menawar selama jangka perjanjian akhir. Negosiasi yang sukses umumnya menghasilkan beberapa jenis pertukaran atau janji yang dibuat oleh negosiator satu sama lain. Pertukaran ini dapat berwujud (seperti uang, komitmen waktu atau perilaku tertentu) atau tidak berwujud (seperti perjanjian untuk mengubah sikap atau harapan, atau membuat permintaan maaf).

Negosiasi adalah cara utama yang orang mendefinisikan kembali hubungan lama yang tidak bekerja untuk kepuasan mereka atau membangun hubungan baru di mana tidak ada sebelumnya. Karena negosiasi adalah suatu proses pemecahan masalah umum, adalah kepentingan setiap orang untuk menjadi akrab dengan negosiasi dinamika dan keterampilan. Bagian ini dirancang untuk memperkenalkan konsep dasar negosiasi dan untuk menyajikan prosedur dan strategi yang umumnya menghasilkan masalah yang lebih efisien dan produktif menghasilkan pemecahan masalah.

### **Kondisi Ideal untuk bernegosiasi**

Berbagai kondisi dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan negosiasi. Kondisi berikut membuat keberhasilan dalam negosiasi itu lebih mungkin terwujud, :

- Identifiable parties who are willing to participate.*
- Interdependence.*
- Readiness to negotiate.*
- Means of influence or leverage.*
- Agreement on some issues and interests.*
- Will to settle.*
- Unpredictability of outcome.*
- A sense of urgency and deadline.*
- No major psychological barriers to settlement.*
- Issues must be negotiable.*
- The people must have the authority to decide.*
- The agreement must be reasonable and implementable.*
- External factors favorable to settlement.*
- Resources to negotiate.*